

**KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA BATU DENGAN JAWA TIMUR
PARK 1 DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KOTA BATU**

(Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu)

SKRIPSI

AYU YUNITA HARDIANTI

0810310182



FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

MOTTO

"PENDIDIKAN MERUPAKAN PERLENGKAPAN PALING BAIK UNTUK HARI TUA." (Aristoteles)

"KETERGESAAN DALAM SETIAP USAHA MEMBAWA KEGAGALAN."
(HERODOTUS)

"KEGAGALAN HANYA TERJADI BILA KITA MENYERAH."
(LESSING)

"ORANG-ORANG HEBAT DI BIDANG APAPUN BUKAN BARU BEKERJA KARENA MEREKA TERINSPIRASI KARENA MEREKA LEBIH SUKA BEKERJA. TAPI KARENA MEREKA TIDAK MENYIANYIAKAN WAKTU UNTUK MENUNGGU INSPIRASI." (ERNEST NEWMAN)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Ayu Yunita Hardianti
NIM : 0810310182
Jurusan/Progam Studi : Ilmu Administrasi Publik / S1
Fakultas : Ilmu Administrasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 14 Agustus 2015



Ayu Yunita Hardianti

NIM. 0810310182

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, Pada:

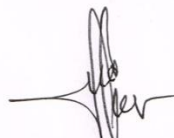
Hari : Selasa
 Tanggal : 25 Agustus 2015
 Jam : 08.00-09.00
 Skripsi atas nama : Ayu Yunita Hardianti
 Judul : Kemitraan Pemerintah Kota Batu Dengan Jawa Timur Park 1 Dalam Meningkatkan Perekonomian Kota Batu (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Batu)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

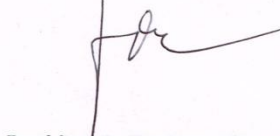



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
 NIP. 19720405 200312 1 001

Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP
 NIP. 19531113 198212 1 001

Anggota

Anggota




Prof. Soesilo Zauhar, MS
 NIP. 19540306 197903 1 005

Drs. Siswidiyanto, MS
 NIP. 19600717 198601 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Kemitraan Pemerintah Kota Batu Dengan Jawa Timur Park 1 Dalam Meningkatkan Perekonomian Kota Batu (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu)**. Skripsi ini menyangkut tentang kontribusi Jawa Timur Park Batu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Batu khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu yang mungkin masih belum banyak orang yang meneliti tentang kontribusi apa saja yang sudah diberikan oleh Jawa Timur Park. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa keterlibatan berbagai pihak yang berkenan membantu memberikan pemikiran, kritik dan saran-saran, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta Ibu Tutik Budi Hartini, kakak, adik dan seluruh keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan do"anya.
2. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si dan bapak Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar, dan telah banyak memberikan kontribusi dan bimbingan yang sangat membantu selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr. Choirul Saleh M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya beserta seluruh staf jurusan Administrasi Publik.
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas

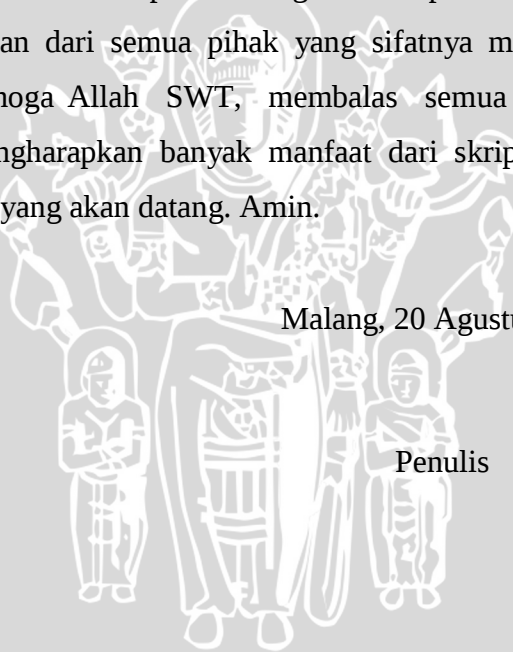
Brawijaya atas segala ilmu yang diberikan.

6. Seluruh pegawai dan staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu atas bantuan dan kerja sama yang diberikan.
7. Teman-teman administrasi publik angkatan 2008 khususnya kelas E dan juga teman-teman kos terima kasih atas segala kenangan dan pengalamannya.
8. Semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kami meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik serta masukan dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan anda. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Amin.

Malang, 20 Agustus 2015

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
A. Administrasi Publik	10
B. Administrasi Pembangunan.....	11
C. Pembangunan.....	11
1. Definisi Pembangunan.....	11
2. Tujuan Pembangunan	13
3. Perkembangan Paradigma Pembangunan.....	14
4. Pengertian Pembangunan Ekonomi.....	16
5. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah	18
6. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Daerah	20
7. Paradigma Pembangunan Ekonomi Daerah	22
D. Governance.....	23
1. Pengertian Governance.....	23
2. Konsep Good Governance.....	25
3. Hubungan Antar Unsur-Unsur Good Governance	28
4. Prinsip-Prinsip Good Governance	31
5. Pilar-Pilar Good Governance.....	33
E. Kemitraan.....	34
1. Pengertian Kemitraan	34
2. Manfaat Kemitraan	37
3. Prinsip Kemitraan.....	41
4. Model Kemitraan.....	41
5. Maksud dan Tujuan Kemitraan	44
6. Prinsip-Prinsip Kemitraan	46

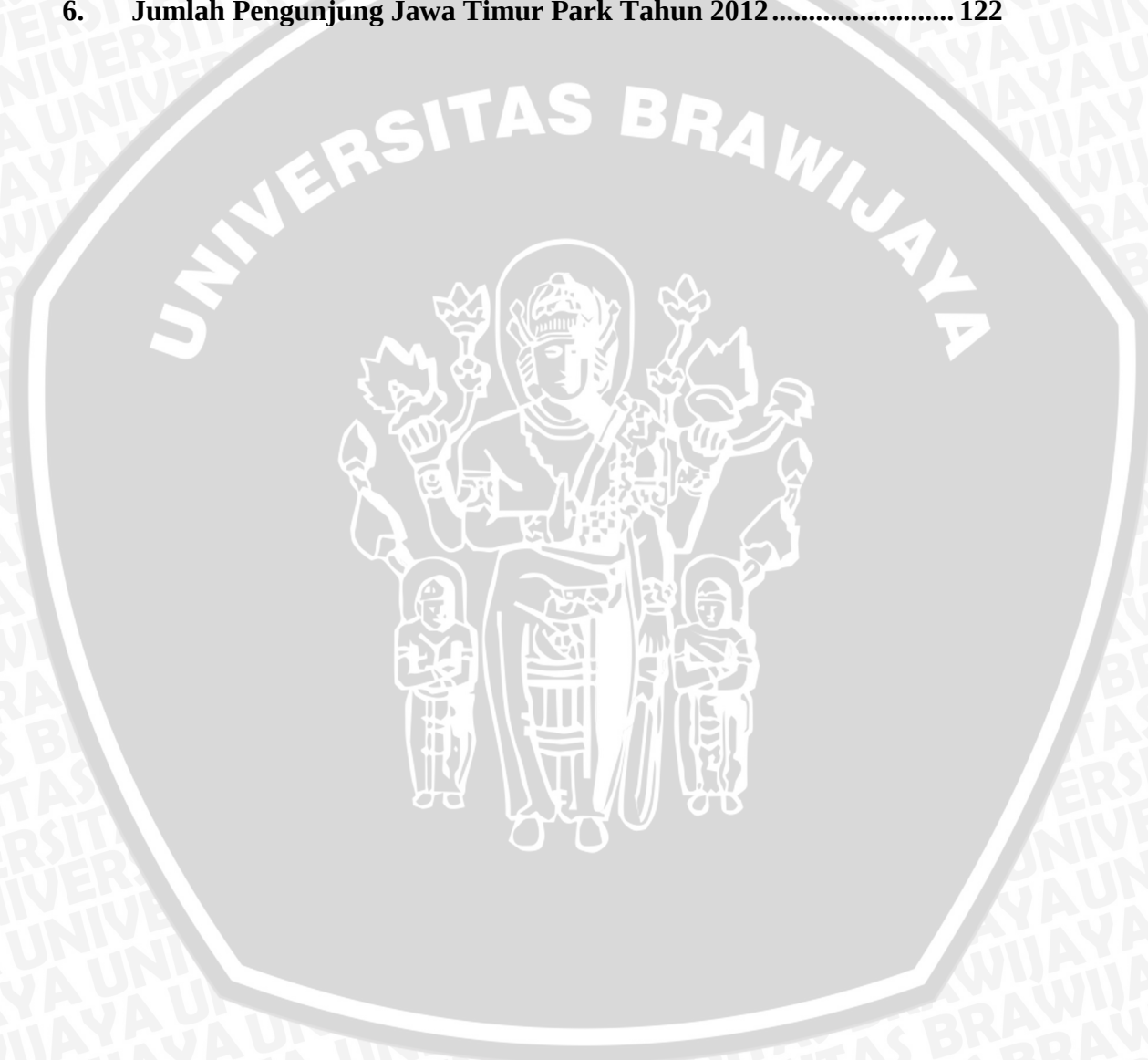
F. Pariwisata	47
1. Pengertian Pariwisata	47
2. Pengertian Wisatawan	49
3. Bentuk-Bentuk Pariwisata	50
4. Jenis-Jenis Pariwisata	52
5. Pengertian Potensi Wisata	54
6. Pengembangan Pariwisata	55
7. Sarana dan Prasarana Pariwisata	57
8. Paradigma Baru Pengembangan Pariwisata	60
G. Peningkatan Peran Serta Swasta dan Masyarakat	63
H. Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata	65
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian	66
B. Fokus Penelitian	68
C. Lokasi Penelitian	69
D. Sumber Data	69
E. Teknik Pengeumpulan Data	71
F. Instrumen Penelitian	71
G. Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Gambaran Umum	75
1. Gambaran Umum	75
a. Sejarah Berdirinya Kota Batu dan Pemerintahan Kota Batu	75
b. Visi dan Misi Kota Batu	82
c. Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif	83
d. Keadaan Topografi dan Klimatologi	84
e. Potensi Pariwisata Di Kota Batu	84
2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu ...	88
a. Sejarah Singkat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu ...	88
b. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.....	89
c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu	91
3. Gambaran Umum Jawa Timur Park 1	100
a. Sekilas Tentang Jawa Timur Park 1	101
b. Peran PT. Bunga Wangsa Sejati Jawa Timur Park 1	102
c. Visi dan Misi Jawa Timur Park 1	103
d. Struktur Organisasi	104
e. Denah Lokasi Jawa Timur Park 1	104
f. Fasilitas Jawa Timur Park 1	105
B. Penyajian Data	109
1. Bentuk Kemitraan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu Dengan Jawa Timur Park 1	109
2. Kontribusi Jawa Timur Park 1 Dalam Meningkatkan Perekonomian Kota Batu	119

a. Sebelum Adanya Jawa Timur Park	119
b. Sesudah Adanya Jawa Timur Park	120
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kemitraan Jawa Timur Park dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu	123
a. Faktor Pendukung	123
b. Faktor Penghambat	126
C. Pembahasan	126
1. Bentuk Kemitraan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu Dengan Jawa Timur Park 1	126
2. Kontribusi Jawa Timur Park 1 Dalam Meningkatkan Perekonomian Kota Batu	130
a. Sebelum Adanya Jawa Timur Park	130
b. Sesudah Adanya Jawa Timur Park	131
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kemitraan Jawa Timur Park dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu	134
a. Faktor Pendukung	134
b. Faktor Penghambat	135
BAB V PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran	140

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

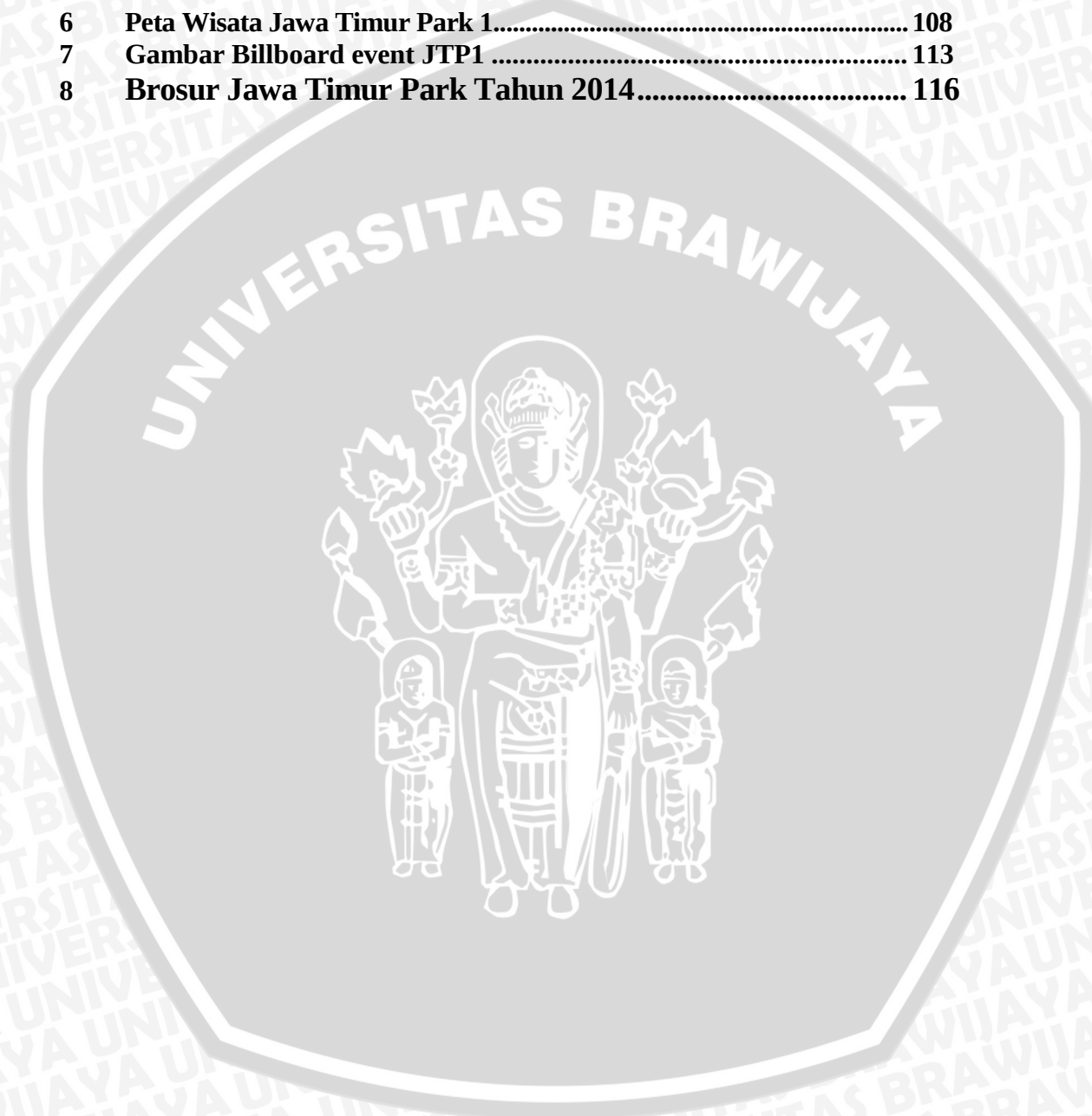
No.	Judul	Halaman
1.	Data Jumlah Pengunjung Objek Wisata Kota Batu Tahun 2009-2011.....	6
2.	Paradigma Pembangunan Ekonomi Daerah.....	23
3.	Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu	99
4.	Batas Wilayah Lokasi Wisata Jawa Timur Park	104
5.	Pendapatan Asli Daerah Kota Batu	120
6.	Jumlah Pengunjung Jawa Timur Park Tahun 2012.....	122



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
-----	-------	---------

1	Hubungan antar sektor dalam <i>governance</i>	30
2	Metode Pengumpulan Data Milles and Hubberman.....	74
3	Peta Kota Batu	81
4	Logo Jawa Timur Park	100
5	Peta Lokasi Jawa Timur Park 1	105
6	Peta Wisata Jawa Timur Park 1.....	108
7	Gambar Billboard event JTP1	113
8	Brosur Jawa Timur Park Tahun 2014.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu kegiatan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah secara sadar dan terencana menuju suatu perubahan yang lebih baik. Hal ini senada dengan pendapat Siagian (1999:4) yang mengungkapkan definisi pembangunan sebagai suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas pembinaan bangsa (*nation building*). Setiap pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara tentunya memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan, salah satu konteks terpenting yang menentukan administrasi pembangunan ini adalah dari tujuan pembangunan yang hendak dicapai itu sendiri. Tujuan pembangunan adalah sebuah konsep yang bersifat dinamis. Tujuan pembangunan akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Indonesia telah lama mencanangkan adanya suatu gerakan pembangunan nasional yang merupakan suatu gerakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dicapai apabila pemerintah meningkatkan pendapatannya baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang bersifat terpadu, menyeluruh dan sistematis sehingga tanggap terhadap perkembangan zaman. Untuk menarik investasi dari pihak swasta, pemerintah menyadari bahwa dibutuhkan reformasi struktural dan kelembagaan dengan cara mendukung peran swasta dalam

pembangunan dengan membuka kesempatan investasi diberbagai proyek pembangunan. Adapun upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi adalah mengadakan perbaikan dan penguatan regulasi yang memungkinkan keikutsertaan sektor swasta secara transparan dan adil melalui mekanisme tender yang terbuka. Selain itu, regulasi yang baru memberikan kejelasan kepada *contracting agencies* (perwakilan dari pihak yang mengadakan perjanjian) mengenai penyelenggaraan kemitraan pemerintah dan swasta dan dukungan pemerintah yang dapat diberikan sebagai insentif kepada swasta untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam setiap sektor pembangunan.

Kemudian pemerintah dalam rangka penataan terhadap kemitraannya dengan pihak swasta, menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Perusahaan Swasta Dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur. Partisipasi sektor swasta atau disebut Badan Usaha dalam Perpres dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu Perjanjian Kerjasama (Konsesi) dan Izin Pengusahaan (Lisensi). Dalam perjanjian kerjasama, menteri/kepala lembaga/kepala daerah mengadakan perjanjian tertulis dengan Badan Usaha untuk menyediakan infrastuktur melalui pelelangan umum. Sedangkan izin pengusahaan ditetapkan melalui pelelangan izin (*auction*) dan dilakukan apabila penguraian (*unbundling*) infrastruktur dan jasa pelayanan tidak mungkin atau sulit dilaksanakan, misalnya pada sektor telekomunikasi, pemipaan minyak dan gas, dan transmisi tenaga listrik.

Salah satu komponen pembangunan daerah adalah pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata secara umum diarahkan pada peningkatan sektor pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggerakkan kegiatan ekonomi. Dimana sektor pariwisata juga merupakan sektor yang sangat terbuka untuk terciptanya lapangan kerja, naiknya pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara (Hidayah, 2011). Menurut Prof. Hunziker dan Prof. Kraff seperti yang dikutip oleh Spillane (1987:22) definisi pariwisata yaitu *“Tourism is the total relationship and phenomena linked with the stay of foreigner at a locality, provided that they do not settle there no exercise a major, permanent or temporary remunerated activity.”* Kepariwisata memerlukan pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut agar dapat berkembang dengan baik, selaras, dan sejajar dengan aspek-aspek pembangunan lainnya sehingga dapat memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti semakin terbukanya lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha dari masyarakat, meningkatkan pendapatan baik masyarakat itu sendiri maupun negara khususnya pemerintah daerah (Oka A. Yoeti, 2008).

Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam tujuan pengembangan kepariwisataan yang dinyatakan dalam UU No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang diantaranya berisi sebagai berikut:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. menghapus kemiskinan
- d. mengatasi pengangguran

e. melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya

Indonesia sebagai negara berkembang yang telah dikenal sebagai negara yang memiliki potensi wisata baik alam ataupun budaya juga menjadikan pariwisata sebagai salah satu industri yang berperan dalam menambah devisa negara. Menurut Yoeti, 2008:3 pengaruh pariwisata pada negara-negara berkembang khususnya Indonesia terlihat jelas seperti:

1. tumbuh dan berkembangnya usaha makanan, restoran, kafe dan minuman yang bersifat lokal yang banyak diminati wisatawan.
2. tumbuh dan berkembangnya industri kecil seperti produk cinderamata khas daerah.
3. Tumbuh dan berkembangnya usaha agen perjalanan untuk melayani wisatawan sampai di daerah tujuan wisata
4. banyaknya usaha-usaha penginapan seperti losmen, bungalow, hotel dan villa.

Jadi jelaslah bagi kita bahwa pariwisata dapat berfungsi mempercepat proses pembangunan dimana pariwisata itu dikembangkan, oleh karenanya pariwisata dapat dijadikan sebagai pendorong untuk pembangunan berkelanjutan bagi suatu negara yang mengembangkannya. Dari uraian tersebut diatas tergambar bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan jalan mengembangkan pariwisata. Dengan demikian pendapatan masyarakat secara otomatis dapat ditingkatkan. Hal ini memungkinkan karena dengan berkembangnya kepariwisataan akan terjadi pula perluasan lapangan pekerjaan sekaligus membuka peluang yang bagus bagi sektor-sektor lain.

Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam Inpres No.16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan

Pariwisata dimana Presiden mengintruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan beberapa hal mendasar yang bisa dijadikan acuan dasar untuk melakukan pembangunan ekonomi daerah. Secara khusus Inpres tersebut memberikan arahan kepada peran Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem informasi dan promosi kepariwisataan daerah.
- b. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (pengembangan produk, pemasaran serta sarana dan pelayanan atau sumber daya manusia).
- c. Mengadakan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan.
- d. Mengembangkan informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Berdasarkan Inpres tersebut menjadi dasar setiap daerah agar berlomba-lomba membangun daerahnya khususnya dibidang pariwisata Karena demikian kompleksnya pengaruh yang ditimbulkan oleh sector pariwisata secara nasional, maka pemerintah merasa perlu mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat memacu keberhasilan program-program pariwisata yaitu 7 Butir Sapta Kebijakan Pariwisata (Musanef, 1995:39) yang bermanfaat dalam memacu keberhasilan program-program pariwisata yang isinya antara lain yaitu:

1. Promosidigencarkan
2. Aksebilitas diperluas
3. Mutu produk dan pelayanan ditingkatkan

Pemerintah Kota Batu dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kota Batu bekerja sama dengan Jatim Park 1 dalam mengembangkan kepariwisataan di Kota

Batu yang terwujud dengan adanya objek pariwisata bernama Jatim Park (Jawa Timur Park) yang berada sekitar 20 km barat Kota Malang (www.wikipedia.com). PT. Bunga Wangsa Sejati Jawa Timur Park merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pariwisata terbesar di Jawa Timur dan Pulau Jawa. Banyak anak perusahaannya yang tersebar khususnya di wilayah Jawa Timur. Di Kota Batu sendiri terdapat anak perusahaan dari Jatim Park Group beberapa diantaranya adalah Jatim Park I dan II, Batu Seceet Zoo, Museum Satwa, BNS, dan yang terbaru adalah Eco Green Park (www.jatimpark.com)

Tabel 1: Data Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kota Batu Tahun 2009 - 2011

Jumlah Pengunjung	2009	2010	2011
BNS	252.973	253.727	323.303
Cangar	302.888	292.764	327.462
Jatim Park (I dan II)	722.376	899.725	1.241.466
Kusuma Agro	83.451	60.352	166225
Selecta	478.946	622.084	1.202.455

Sumber: batukota.bps.go.id

Letak Kota Batu yang berada di lereng Gunung Panderman dan Arjuna membuat daerah ini menjadi tujuan wisata. Hal ini ditunjang dengan beberapa tempat wisata yang memang sudah ada sejak jaman dulu seperti Selecta. Seiring berjalannya waktu tempat wisata di Kota Batu semakin bertambah jumlahnya baik itu wisata alam maupun wisata buatan, apalagi sejak dicanangkannya Kota Batu sebagai Kota Wisata pada tahun 2009, maka pembangunan di bidang pariwisata

semakin digalakkan. Apalagi kunjungan wisatawan di Seleka dan Jatim Park selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu Jatim Park merupakan salah satu objek wisata yang menyumbang devisa daerah terbesar di Kota Batu.

Pengelolaan objek wisata melalui kerjasama ini telah memberikan banyak perubahan bagi pembangunan pemerintahan Kota Batu. Dengan digandengnya PT. Bunga Wangsa Sejati Jawa Timur Park sebagai mitra kerja maka memberikan kesempatan kepada Kota Batu untuk lebih dikenal luas. Kemitraan ini juga dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat karena mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kemitraan Pemerintah Kota Batu Dengan Jatim Park 1 Dalam Meningkatkan Perekonomian Kota Batu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kemitraan yang terjalin antara Jatim Park 1 dengan pemerintah Kota Batu?
2. Bagaimanakah kontribusi Jatim Park 1 dalam meningkatkan perekonomian Kota Wisata Batu?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Jatim Park 1 dalam meningkatkan perekonomian Kota Wisata Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis, mendeskripsikan dan mengetahui pola/gambaran kemitraan yang terjalin antara Jatim Park 1 dengan pemerintah Kota Batu
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kontribusi Jatim Park 1 dalam meningkatkan perekonomian Kota Wisata Batu
3. Untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Jatim Park 1 dalam meningkatkan perekonomian Kota Wisata Batu

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu kontribusi bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi Administrasi Publik dan dalam membangun pemikiran pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan memberikan informasi bagi penelitian berikutnya.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi peneliti: hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sarana untuk memperdalam wacana keilmuan dan peningkatan pengetahuan khususnya dalam hal meningkatkan potensi pariwisata Kota Batu

- b. Bagi Kantor Dinas Pariwisata: hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada Kantor Dinas Pariwisata
- c. Bagi masyarakat: hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat tentang bagaimana pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah gambaran secara singkat antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar melakukan pemecahan masalah. Dalam kajian pustaka ini teori yang digunakan merupakan kutipan pendapat dari para ahli baik dari dalam maupun luar negeri.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, mencakup materi yang terdiri dari

jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan data-data dari hasil penelitian antara lain gambaran umum lokasi penelitian dan data fokus penelitian, kemudian data-data dari hasil penelitian tersebut dianalisa dan diinterpretasikan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah garis besar dari hasil pembahasan, sedangkan saran merupakan sumbangan sumbangan pemikiran penulis yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Administrasi publik adalah suatu kombinasi kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan untuk mempromosikan pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial (Henry, dalam Keban 2008).

Menurut Sondang P. Siagian (2008) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi publik adalah bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah negara yang merupakan sebagian dari pemerintah eksekutif baik di pusat maupun di daerah yang tugas dan kegiatan utamanya melaksanakan kebijakan pemerintah (Soempono, dalam Toha 2008). Pandangan ini lebih menekankan pada peran negara yang sangat dominan dan terpusat dalam mengelola pemerintah, meskipun pada pelaksanaannya masyarakatlah yang menjadi tujuan utama.

B. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan salah satu bagian dari administrasi publik. Administrasi pembangunan ini mempunyai fokus analisis yang berupa proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu negara dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan suatu negara tertentu, termasuk metode ilmiah yang dipergunakan dalam pencegahan masalah, menanggapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkronkan ancaman (Siagian:2005).

Definisi lain dari administrasi pembangunan yaitu suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam pembinaan bangsa (Siagian:2005). Melalui definisi tersebut dapat diketahui tentang ide pokok dari administrasi pembangunan yaitu adanya suatu proses yang terus menerus, usaha yang dilakukan dengan perencanaan, orientasi pada perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya, memiliki arah yang lebih modern dalam arti luas mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta memiliki tujuan utama untuk membina bangsa.

C. Pembangunan

1. Definisi Pembangunan

Kata pembangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Suryono (2010:1) berasal dari kata “bangun” yang berarti sadar, siuman, bangkit, berdiri dan juga berarti bentuk. Dalam kata kerja, “bangun” juga berarti membuat, mendirikan atau membina. Sehingga pembangunan meliputi bentuk (*anatomik*), kehidupan (*fisiologis*), dan perilaku (*behavioral*). Siagian (2003:4) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih singkat mengenai pembangunan yaitu suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Bryan and White dalam Suryono (2001:37) mendefinisikan pembangunan sebagai berikut:

1. *Capacity*, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok
2. *Equity*, pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan
3. *Empowerment*, pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan
4. *Sustainability*, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara sendiri
5. *Interdependence*, pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati

Pada hakekatnya pembangunan dapat diartikan sebagai proses untuk membuat suatu perubahan yang lebih baik. Pembangunan juga berarti pendayagunaan potensi masyarakat semaksimal mungkin dengan jalan partisipasi aktif menurut kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Selain itu pembangunan merupakan suatu upaya masyarakat bangsa menuju suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang menuju kearah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat bangsa itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian pembangunan dapat dimaknai sebagai kegiatan nyata dan terencana yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memacu masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Di Indonesia proses atau program pembangunan dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia

seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Hakikat pembangunan ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional mengejar keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Pembangunan nasional yang berkesinambungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Selanjutnya pembangunan nasional harus diselenggarakan secara merata diseluruh negara, bagi seluruh masyarakat dan bukan ditujukan untuk kepentingan suatu golongan atau kelompok. Hasil pembangunan nasional harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat dalam bentuk peningkatan taraf hidup dan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

2. Tujuan Pembangunan

Pada dasarnya pembangunan dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya secara adil sehingga masyarakat bisa terbebas dari kemiskinan dan keadaan serba kekurangan. Pembangunan juga bertujuan untuk merealisasikan potensi yang sudah ada dimasyarakat agar dapat berkembang dengan baik.

Tujuan-tujuan pembangunan secara umum adalah:

1. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan pemerataan baik materiil maupun spiritual.
2. Dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan pembangunan secara umum adalah menuju masyarakat yang adil dan makmur, serta membangun manusia Indonesia seutuhnya.
3. Sukirno (1985:60) menyatakan bahwa tujuan pembangunan merupakan suatu kehendak masyarakat untuk mencapai suatu keadaan tertentu dimasa yang akan datang.

Pembangunan secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu dalam pembangunan terkandung unsur-unsur:

1. Perubahan, yaitu perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan
2. Tujuan, yaitu tujuan yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat (manusia) menuju pelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik
3. Potensi, yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan. (Suryono, 2010:4)

3. Perkembangan Paradigma Pembangunan

Paradigma dimaksudkan sebagai cara pandang terhadap suatu persoalan yang didalamnya terdapat sejumlah asumsi, teori, metodologi, model dan solusi tertentu. Paradigma yang satu dengan paradigma yang lain, pada hakikatnya tidak dapat disamakan apalagi dipersatukan, tetapi paradigma dapat diperbandingkan. Asumsi berkaitan dengan persoalan keyakinan dan kepercayaan. Menurut Suryono (2001:58) terdapat tiga paradigma yang dipandang cukup dominan, khususnya di negara kita yaitu:

1. Paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*)

Pelaksanaan pembangunan di negara berkembang penekanannya pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Penerapan paradigma ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

2. Paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*)

Berorientasi ingin mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial dalam waktu sesingkat mungkin. Pelaksanaan pembangunan bersifat sentralistik (*top down*) sehingga cenderung menumbuhkan hubungan ketergantungan antara rakyat dan proyek-proyek pembangunan (birokrasi pemerintah) yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Paradigma pembangunan manusia (*people centered development paradigm*)

Fokus dari paradigma ini yaitu berpusat pada manusia yakni perkembangan manusia, kesejahteraan, keadilan dan keberlanjutan. Dan seperti definisi yang diberikan oleh wikipedia *People centred development is an approach to international development that focuses on improving local communities, self-reliance, social justice, and participatory decision making* (www.wikipedia.com).

Pendapat lain tentang paradigma *people centred development* diungkapkan oleh David C. Korten dan George Carner (1988:270) yang berpendapat, pembangunan yang berpusat kepada masyarakat menempatkan manusia dan lingkungan sebagai variabel yang utama dalam perencanaan pembangunan. Dimana masyarakat diberikan kesempatan dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah cukup mendengarkan, mengartikan dan menterjemahkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun tidak lupa juga pemerintah terkait juga harus berinteraksi dan bergumul dengan masyarakat agar dapat mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka (Suryono, 2010. 254:255).

Kata *people centered development* merujuk pada kata *empowerment* atau pemberdayaan masyarakat. *Empowerment* berarti mewujudkan potensi yang sudah ada didalam masyarakat. Pendekatan *people centered development* melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya atau memperkuat kemampuan masyarakat miskin khususnya dalam mengarahkan potensi yang telah ada untuk memenuhi kebutuhannya (Moelyarto, 1999: 37-38).

4. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Menurut Arsyad (2004:11) pembangunan ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mengubah keadaan ekonomi suatu negara menuju keadaan yang lebih baik yang penduduknya dapat hidup dengan makmur dan sejahtera. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi menurut Hasibuan (1987:61-62) antara lain adalah:

1. Sumber daya alam

Tanah dan kekayaan alam ikut mempengaruhi laju tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah. Jika suatu negara/daerah memiliki banyak kekayaan alam maka turut menyukseskan keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara/daerah tersebut. Sumber daya alam dapat dikategorikan atas dua bagian yaitu sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

2. Sumber daya manusia

Merupakan sumber daya produksi yang sangat penting. Keadaan ekonomi suatu negara dalam banyak hal sangat tergantung pada sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih akan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan sebaliknya kelebihan tenaga kerja akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

3. Teknologi

Penerapan teknologi yang canggih akan menghasilkan produksi yang melimpah sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara/daerah.

4. Modal

Bagi semua negara terutama negara yang sedang berkembang dibutuhkan modal untuk melakukan pembangunan. Modal merupakan sumber ekonomi yang potensial yang dapat diubah menjadi sumber ekonomi riil. Akibat dari kecilnya modal yang dimiliki maka investasi juga rendah dan pendapatan masyarakat pun menjadi rendah. Hal inilah yang dialami negara sedang berkembang sehingga sulit untuk melakukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Todaro dalam (Arsyad, 2004:11) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjuk dengan berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

5. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pengertian pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (2004:298) adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Sehingga kita perlu melakukan pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah memunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus memperkirakan potensi sumber daya

yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2004:299).

Menurut Tjokrowidjojo (1994:23) pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Segi pembangunan sektoral, pencapaian sasaran pembangunan dilakukan melalui berbagai pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral disesuaikan dengan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
2. Segi pembangunan wilayah, yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah.
3. Segi pemerintahannya agar tujuan pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pembangunan daerah perlu berfungsi dengan baik karena itu pembangunan usaha-usaha untuk mengembangkan dan mempererat pemerintahan daerah dalam rangka makin mantabnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah lebih diarahkan pada peningkatan kemandirian dan kemampuan daerah dalam merencanakan dan mengelola daerah juga meningkatkan koordinasi pembangunan antar sektor dan antar daerah serta antar pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah. Disamping itu, pembangunan daerah diarahkan untuk mendorong berkembangnya ekonomi daerah dengan menitikberatkan pada daerah kota atau daerah tingkat II.

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah:

1. Memanfaatkan potensi yang ada di daerah untuk pengembangan daerah yang bersangkutan
2. Mengusahakan daerah-daerah yang relatif terbelakang dapat berkembang dengan laju yang lebih cepat dari daerah-daerah lainnya sehingga dapat mengurangi terjadinya kesenjangan yang mencolok dalam tingkat kemajuan antar daerah dan pemerataan pendapatan antar golongan masyarakat pada masing-masing daerah.
3. Mengusahakan agar peranan daerah-daerah yang relatif terbelakang makin besar dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional.

6. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah

Menurut Arsyad (2004:312-313) peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses meningkatkan pembangunan ekonomi daerah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Entrepreneur

Dengan adanya peran pemerintah daerah sebagai *entrepreneur*, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat mengembangkan suatu usaha sendiri melalui BUMD. Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomi menguntungkan.

2. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya.

Perluasan dari peranan ini dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran dan lainnya.

Dalam peranannya sebagai koordinator, pemerintah daerah juga dapat melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan startegi-strategi. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah dengan nasional dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapat manfaat yang maksimum daripadanya.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (*zoning*) yang lebih baik.

4. Simulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada didaerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan, pembuatan outlets, mengadakan pameran dan lain-lain.

7. Paradigma Pembangunan Ekonomi Daerah

Teori pembangunan ekonomi daerah yang ada sekarang ini (seperti yang dikemukakan sebelumnya) memang belum mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan untuk kepentingan pembangunan ekonomi daerah. Berikut paradigma baru yang diungkapkan oleh Arsyad (2004:302) yang digunakan dalam pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 2: Paradigma Pembangunan Ekonomi Daerah

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Kesempatan kerja	Semakin banyak perusahaan, semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga baru
Aset-aset lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumber daya pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber: Arsyad (2004:302)

D. Governance

1. Pengertian Governance

Perbedaan dari pemerintahan (*government*) dengan tata pemerintahan (*governance*) adalah jika pemerintah (*government*) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Contohnya, ditingkat desa konsep pemerintah (*government*) merujuk kepada kepala desa beserta perangkat desa. Sedangkan tata pemerintahan (*governance*) lebih menggambarkan pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. Menurut Sedarmayanti (2004:2) mendefinisikan pemerintah (*government*) sebagai pengarah dan administrasi berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya.

Sedangkan istilah pemerintahan (*governance*) yaitu tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian *governance* adalah suatu kegiatan/proses, sebagaimana dengan yang diungkapkan oleh Koeiman (1993) dalam Sedarmayanti (2004:2) bahwa *governance* adalah serangkaian proses interaksi-interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Istilah dan konsep *governance* mulai berkembang pada awal 1990-an ditandai dengan adanya cara pandang baru terhadap peran pemerintah (*government*) dan sistem pemerintahan. Pandangan ini timbul disebabkan peran pemerintah dinilai terlalu besar, sehingga masyarakat tidak memiliki keleluasaan untuk berkembang. Pemerintah menjadi institusi yang paling berkuasa dan menganggap paling mengetahuikan memahami apa yang diinginkan

masyarakat. Program maupun kebijakan pemerintah dibuat tanpa perlu merasa mendengar aspirasi masyarakat. Pemerintah menentukan apa yang terbaik dan berguna bagi masyarakat menurut cara pandanganya. Tindakan itu justru menjadikan dukungan terhadap pemerintah menjadi menurun.

Sedarmayanti (dalam Ananto Basuki dan Shofwan, 2006: 8-9) menyatakan bahwa *United Nation Development Program* mendefinisikan *governance* sebagai berikut: “*governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affair at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population*”. (“Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kepaduan sosial, integrasi dan menjamin masyarakat.”)

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik (Hertiefah, 2003:2). Kualitas *governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, *civil society* dan sektor swasta. Kepemerintahan yang baik memiliki unsur-unsur *accountability*, *participation*, *predictability* dan *transparency*. Konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan.

Dari segi fungsional, aspek *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau justru sebaliknya dimana pemerintah tidak

berfungsi secara efektif dan inefisiensi (Sedarmayanti, 2003:4). Oleh karena itu intitusi *governance* meliputi tiga stakeholder yaitu *state* (negara/pemerintah), *private sector* (sektor swasta) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. *State*/negara/pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector*/ sektor swasta menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society*/masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, politik termasuk menjaga kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi, sosial dan politik (Hertiefah, 2003:3)

2. Konsep *Good Governance*

Definisi *Good Governance* menurut Bank Dunia (*World Bank*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Kata *good* yang berarti “baik” menurut Ananto Basuki dan Shofwan (2006:9) dalam istilah pemerintahan mengandung dua makna yaitu:

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Antonio Ismael dalam Hetifah(2003:79) menyatakan bahwa dari ratusan benang kusut (masalah) penyelenggaraan *good governance* di Indonesia adalah peran pemerintah sebagai “fasilitator” dan mengurangi perannya sebagai pelaku. Lembaga Administrasi Negara (Sedarmayanti dalam Ananto Basuki dan Shofwan, 2006: 9-10) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Dengan demikian pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance*) dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Negara/pemerintahan: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar seperti, industri pengolahan, perdagangan, perbankan dan koperasi, termasuk sektor informal.
3. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Ananto Basuki dan Shofwan (2006:13) mengatakan *good governance* merupakan upaya untuk merubah watak pemerintah (*government*) yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat menjadi pemerintah yang aspiratif. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintah yang menerapkan *good governance* masyarakat tidak lagi dandang sebagai objek yang ingin dicetak sebagaimana yang diinginkan pemerintah. Tetapi masyarakat menjadi subjek yang turut ikut mewarnai program-program dan kebijakan pemerintah. Sistem pemerintahan yang menjadikan masyarakat sebagai subyek hanya terdapat dalam sistem pemerintahan yang mempraktekkan sistem demokratis. Dengan demikian prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance* hanya akan tumbuh pada pemerintahan yang mempraktekkan sistem demokrasi.

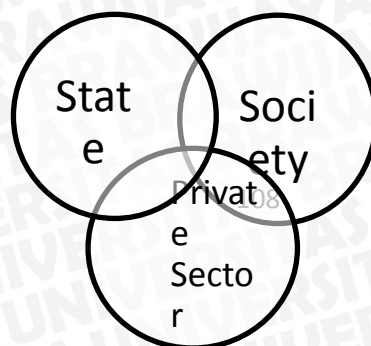
Menurut C.F Strong dalam Inu Kencana (2001:22) "*Governance is the boarder sense, is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, here first military power or the control of armed forces, secondly legislative power of the means of making law, thirdly financial powr or the ability extract inufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the states behalf.*" ("Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan atau kekuatan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang. Yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial

atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyalenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.”)

Pemerintah menurut Inu Kencana (2001:23) adalah suatu organisasi negara yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mensejahterahkan rakyatnya, dan memiliki kekuatan untuk memaksakan peraturan-peraturan serta memiliki kewenangan militer, pembuatan undang-undang, dan mengelola secara penuh finansial negara. Sedangkan yang dimaksud dengan teknik-teknik pemerintahan menurut Inu Kencana (2001:44) adalah berbagai pengetahuan, kepandaian dan keahlian tertentu dalam cara yang dapat ditempuh atau digunakan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan berbagai peristiwa-peristiwa pemerintahan. Dalam Inu Kencana (2001: 44-46) disebutkan beberapa teknik pemerintahan antara lain: (a) koordinasi, (b) partisipasi, (c) desentralisasi, (d) sentralisasi (e) dekonsentrasi, (f) sentralisasi, (g) Intergrasi dan (h) delegasi

3. Hubungan Antar Unsur-Unsur *Good Governance*

Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan (Hertiefah, 2003:5). *Governance* sendiri terdiri dari tiga aktor, bukan hanya pemerintah tetapi juga bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat. Sedarmayanti (2003: 5-6) juga mencoba menggambarkan hubungan antar sektor dalam *governance*, yaitu:



Gambar 1. Hubungan antar sektor dalam *governance*

Negara, sebagai suatu unsur *governance* didalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak diberbagai sektor informal lain dipasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. Sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta memiliki pengaruh terhadap kewajiban sosial, politik dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri. Sedangkan masyarakat terdiri dari individual maupun kelompok (baik yang terorganisir maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. *Society* meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain (Sedarmayanti, 2000:6).

Dalam Bab III Inpres Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisata Nasional dijelaskan mengenai **peranan swasta** dalam rangka pengembangan pariwisata adalah “Ruang lingkup peranan swasta ditujukan kepada usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan perusahaan dalam bidang kepariwisataan seerti usaha-usaha transportasi, akomodasi, entertainment dan pelayanan kepada masyarakat”. Kemudian dalam pasal 9 yang

membahas Peranan Pemerintah dalam Hubungan Dengan Swasta dijelaskan bahwa:

- a. Peranan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam bidang kegiatan tersebut pada pasal 8 instruksi ini terbatas pada pembinaan dan pengarahannya, dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dalam hal pihak swasta tidak atau belum mampu untuk melakukan kegiatan tersebut pada pasal 8 instruksi ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing, mengadakan usaha-usaha yang dianggap perlu memungkinkan pelaksanaan tersebut.

Sedangkan peran serta masyarakat dalam kemitraan untuk Pengembangan Pariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata Pasal 30 yaitu:

1. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
2. Dalam rangka proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan.
3. Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Good governance has a 8 major characteristics. It is participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows rule of law. (UNESCAP)

Menurut Tcokroamidjojo (2006:48) bahwa pemahaman konsepsi pengelolaan pemerintahan yang amanah dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Akuntabilitas (*Accountability*)

Adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak meminta pertanggung jawaban.

b. Transparansi (*Transparency*)

Dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan mengenai kebijaksanaan pemerintah dan organisasi badan usaha.

c. Keterbukaan (*Openness*)

Pemberian informasi secara terbuka, terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk perbaikan.

d. Berdasarkan hukum (*Rule of law*)

Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku). Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Conflict resolution (penyelesaian konflik) berdasarkan hukum.

e. Jaminan *fairness, a level playing field* (perlakuan yang adil/ perlakuan kesetaraan).

Ini berlaku bagi pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan publik, perusahaan kepada pelanggan dan sebagainya.

Prinsip-prinsip *good governance* juga diungkapkan dalam www.transparansi.or.id yang memberikan pendapat berbeda:

a. Partisipasi masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan dan pemberian kebebasan untuk mengungkapkan pendapat serta berpartisipasi secara konstruktif dalam pembangunan.

b. Tegaknya supremasi hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu.

c. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas sehingga seluruh proses pemerintahan dapat dipantau

d. Peduli pada stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan

e. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

f. Efektivitas dan efisiensi

Proses pemerintahan yang dapat memenuhi segala kepentingan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

g. Akuntabilitas

Keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan

h. Visi strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik.

5. Pilar-Pilar *Good Governance*

Good governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. *United Nation Development Program* (UNDP dalam Sinambela (2006:48) merumuskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan sebagai pelaku dalam *good governance*, yaitu:

1. Negara atau Pemerintah

- a. menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil
- b. membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
- c. menyediakan public service yang efektif dan accountable
- d. menegakkan hak asasi manusia
- e. melindungi lingkungan hidup
- f. mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

2. Sektor swasta

- a. menjalankan industri
- b. menciptakan lapangan kerja
- c. menyediakan insentif bagi karyawan

- d. meningkatkan standar hidup karyawan
- e. memelihara lingkungan hidup
- f. menaati peraturan
- g. transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
- h. menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

3. *Civil society* atau masyarakat madani

- a. menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
- b. mempengaruhi kebijakan publik
- c. sebagai sarana check and balance pemerintah
- d. mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
- e. mengembangkan sumber daya manusia
- f. sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

Pilar yang menjadi penopang terlaksananya pemerintahan yang baik adalah adanya kerjasama yang saling mendukung antar negara/pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan adanya kerjasama antar ketiganya maka *good governance* akan lebih cepat terwujud.

E. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan/*Partnership*

Menurut Sulistyani (2004:129), kemitraan sama artinya dengan kerjasama. Dimana kemitraan dapat dilihat dari perspektif etimologis yang diadaptasi dari kata *partnership* yang berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan menjadi “pasangan, jodoh, atau sekutu”. Sedangkan *partnership* dapat diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Dari sini kemitraan

dapat diartikan menjadi suatu persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangkameningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau usaha tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Pendapat lain tentang kemitraan diungkapkan oleh Hafsah (2000:43) yang berpendapat bahwa kemitraan adalah sutu strategi bisnis yang dilakkan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersamadengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Kemitraan sebagaimana yang diungkapkan oleh sejumlah pakar menunjuk pada suatu sistem kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah dalam kedudukan yang sejajar dalam rangka mencapai tujuan bersama. Ada beberapa prasyarat awal bagi keberhasilan kerja kemitraan yang melibatkan kepentingan semua pihak yang terlibat, yaitu badan-badan dan departemen pemerintah dan masyarakat setempat sendiri.

Dari beberapa definisi diatas, Sulistiyani (2004:129) menjelaskan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ada dua pihak atau lebih
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
3. Ada kesepakatan
4. Saling membutuhkan

Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara atau subordinate, memiliki kesamaan visi atau misi berbeda tetapi saling mengisi/melengkapi secara fungsional.

Menurut Hafsah (2000:46) kemitraan adalah suatu proses. Proses yang dimulai dengan perencanaan, kemudian rencana itu diimplementasikan dan selanjutnya dimonitor serta dievaluasi terus menerus oleh pihak yang bermitra. Dengan demikian terjadi alur tahapan yang jelas dan tertur sesuai dengan yang ingin dicapai. Karena kemitraan merupakan suatu proses, maka keberhasilannya secara optional tentu tidak selalu dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Keberhasilannya diukur dengan pencapaian nilai tambah yang didapat oleh pihak yang bermitra baik dari segi material maupun non material. Nilai tambah ini akan berkembang terus sesuai dengan meningkatnya tuntutan untuk mengadaptasi berbagai perubahan yang terjadi. Singkatnya nilai tambah yang didapat merupakan fungsi dari kebutuhan yang ingin dicapai. Dengan kata lain keberhasilan kemitraan merupakan suatu resultan dari konsistensi dalam penerapan etika bisnis, perencanaan yang tepat dibarengi dengan strategi yang jitu serta proses pelaksanaan yang selalu dimonitor, dievaluasi dalam lingkungan dan kondisi yang kondusif serta hal yang tak dapat dipungkiri adalah faktor keberuntungan (lucky).

Hafsah (2000:46) juga menjelaskan tentang pemerintah yang mempunyai andil besar dalam memacu keberhasilan kemitraan terutama dalam menciptakan iklim yang kondusif serta meregulasi peraturan-peraturan yang

menghambat baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan upaya-upaya menumbuhkembangkan kemitraan. Keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha kecil, petani, nelayan dan pengrajin dalam mempermudah arus investasi, permodalan, manajemen yang efisien. Keseimbangan ini merupakan faktor kunci untuk memacu percepatan pencapaian nilai tambah bagi pihak yang bermitra.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, kemitraan didefinisikan sebagai kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra dan bukan sebaliknya ada satu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya suatu kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat diperlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan lainnya.

2. Manfaat Kemitraan

a. Produktivitas

Chase dan Aquilano dalam Hafsah (2000:54) mengungkapkan bahwa dalam era ekonomi global dimana mekanisme pasar menjadi acuan semua pelaku ekonomk, maka kata kunci yang menjadi indikator keunggulan adalah

produktivitas. Secara umum produktivitas didefinisikan dalam model ekonomi sebagai output dibagi dengan input. Dengan kata lain produktivitas akan meningkat apabila dengan input yang sama dapat diperoleh hasil yang lebih tinggi atau sebaliknya dengan tingkat hasil yang sama hanya membutuhkan input yang lebih rendah.

Hafsah (2000:54-55) lebih lanjut menuliskan bahwa jika kemitraan dikaitkan dengan teori diatas maka peningkatan produktifitas diharapkan dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bermitra. Bagi pengusaha yang lebih besar, peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Tingkat produksi (output) yang diharapkan dapat dicapai dengan mengurangi faktor input, misalnya target penjualan dapat dicapai dengan pengurangan tenaga kerja lapangan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu dengan menerapkan model pemasaran berjenjang (multilevel marketing) dimana kegiatan pemasaran dilapangan dilakukan oleh pemasar lepas atau perusahaan mandiri. Disektor pertanian, model ini dilaksanakan dengan pola PIR dimana perusahaan besar dapat mengoprasionalkan kapasitas pabriknya secara full capacity tanpa perlu memiliki lahan dan pekerja lapangan sendiri, karena biaya untuk keperluan tersebut ditanggung oleh petani plasma serta program PIR.
2. Peningkatan produktivitas bagi perusahaan besar dilakukan dengan cara meningkatkan produksi (output) dengan menggunakan sumber daya sendiri yang sama/tetap baik jumlah maupun kualitasnya. Contoh ini

diambil dari model usaha waralaba, dimana perusahaan induk (pemilik nama) dapat meningkatkan pangsa pasarnya tanpa harus membiayai sendiri pembukaan cabang-cabang barunya

b. Efisiensi

Menurut Hafsah (2000:56) bahwa efisiensi dan produktivitas sama halnya dengan mata uang dengan sisi yang berbeda keduanya dapat ditingkatkan dengan meminimalkan pengorbanan (input). Dalam hal efisiensi input tersebut dapat berbentuk waktu dan tenaga. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi dan sarana produksi, dengan bermitra akan dapat menghemat waktu produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar.

c. Jaminan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas

Hafsah (2000:59) menjelaskan tentang kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang biasa disingkat “Tiga Tas” sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan produktivitas yang menentukan terjaminnya pasokan pasar dan pada gilirannya menjamin keuntungan perusahaan mitra. “Tiga Tas” ini memerlukan manajemen yang mantap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Sehingga perlu disertai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang jelas dan disiplin yang ketat. “Tiga Tas” ini juga merupakan perekat kemitraan, apabila berhasil dapat melanggengkan kelangsungan kemitraan kearah penyempurnaan.

d. Risiko

Menurut Hafsah (2000:60) bahwa setiap kegiatan bisnis atau usaha selalu ada risiko. Bahkan satu norma yang dianut oleh dunia usaha bahwa keuntungan/kesuksesan yang besar biasanya mengandung konsekuensi risiko yang besar dapat ditanggung bersama (risk sharing). Tentunya pihak-pihak yang bermitra akan menanggung risiko secara proporsional sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya Hafsah (2000:60) menuliskan tentang manajemen risiko, yaitu dalam teori manajemen risiko dilihat dari sudut finansial, perusahaan besar biasanya menerapkan falsafah “tidak menaruh telur dalam satu keranjang (do not put your all eggs in one basket)”, artinya dengan modal yang ada diusahakan untuk mendiversifikasi usahanya dalam beberapa kegiatan. Hal ini akan mudah tercapai apabila perusahaan tersebut bekerjasama atau bermitra dengan pihak lain.

e. Sosial

Dengan kemitraan usaha bukan hanya memberikan dampak positif dengan saling menguntungkan melainkan dapat memberikan dampak sosial (social benefit) yang cukup tinggi. Ini berarti negara terhindar dari kecemburuan sosial yang bisa berkembang menjadi gejolak sosial akibat ketimpangan. Demikian pula melalui kemitraan dapat menghasilkan persaudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda status. Hal ini sesungguhnya merupakan wujud dari keadilan sosial dan keadilan ekonomi seperti diamanatkan dalam UUD 1945 (Hafsah, 2000:61)

3. Prinsip Kemitraan

Partnership dalam Hetifah (2003:139) diartikan sebagai perspektif baru yang merupakan penjabaran dari *good governance*. *Partnership* menurut Hetifah hanya dapat berlangsung apabila ada *trust* (kepercayaan) antar para pihak yang terlibat. Pemerintah perlu terlebih dahulu menghilangkan rasa ketidakpercayaan komunitas terhadap dirinya. Tanpa itu, prospek menuju *good governance* sulit dicapai. Di masa lalu, penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik lain merupakan tanggungjawab dari pemerintah semata. Sektor swasta dan komunitas sendiri tidak banyak terlibat. Sehingga Hatifah mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip kemitraan antara lain : 1). Kepercayaan (*trust*), 2). Kesetaraan (*equality*) dan 3) kemandirian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemitraan antar tiga sektor harus memanfaatkan sumber daya daerah yang demi mencapai tujuan bersama. Dalam mencapai tujuan ini, ketiga sektor harus saling bekerja sama dan menghargai serta melaksanakan prinsip-prinsip kemitraan.

4. Model Kemitraan

Sesuai dengan model-model yang ada, kemitraan dapat dibedakan sebagai berikut (Sulistiyani, 2004:130):

1. Kemitraan semu atau *Pseudo Partnership*
2. Kemitraan mutualistik atau *Mutualism Partnership*
3. Kemitraan melalui peleburan dan pengembangan, atau *Conjugation Partnership*

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar dan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa semua itu dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan apa manfaatnya. (Sulistiyani, 2001:130-131)

Salah satu contoh pola kemitraan semu yang diterapkan oleh pemerintah adalah pada zaman orde baru, yaitu adanya slogan “pembangunan dari dan oleh pemerintah untuk rakyat.” Pada dasarnya rakyat diposisikan sebagai mitra kerja oleh pemerintah, tetapi rakyat tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pemerintah.

Kemitraan mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal. Berdasarkan pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerja sama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya dan sekaligus saling menunjang satu dengan yang lain. Pemikiran kemitraan demikian itu diadopsi dari pola simbiosis mutualisme

yang terjadi antara kerbau dan burung dalam kehidupan binatang (Sulistiyani, 2004:131)

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan "*paramaecium*". Dua "*paramaecium*" melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing. (Sulistiyani, 2004:131)

Model kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas azas kehidupan organisasi pada umumnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan atas fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup (Sulistiyani, 2004:131):

1. *Subordinate union of partnership*
2. *Linear union of partnership*
3. *Linear collaborative of partnership*

Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif atau kemudian disebut dengan *Subordinate union of partnership*. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam satu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah,

kuat-lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang seimbang (Sulistiyani, 2004:131-132).

Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau dgaris lurus, selanjutnya disebut dengan *Linear union of partnership*. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume, usaha atau organisasi, status atau legalitas. (Sulistiyani, 2004:132)

Kemitraan dengan melalui kerjasama secara linear selanjutnya disebut dengan *Linear collaborative of partnership*. Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status atau legalitas, kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling ter subordinasi. (Sulistiyani, 2004:132).

5. Maksud dan Tujuan Kemitraan

Hafsah (2000:62) mengatakan pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah "*Win-Win Solution Partnership*". Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh-

majikan atau atasan-bawahan sebagai adanya pembagian risiko dan keuntungan yang proposional, disinilah kekuatan dan kemitraan usaha.

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret menurut Hafsah (2000:63) adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional
- e. Memperluas lapangan kerja, dan
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

Agar supaya tujuan dapat terwujud, maka pola hubungan kerja yang bercirikan kemitraan usaha perlu ditumbuhkembangkan. Dengan menumbuhkan kesetaraan diantara pelaku kemitraan dapat tercipta melalui dua cara yaitu cara alami yang akan terjadi pada kegiatan usaha yang produk dan pola usahanya memungkinkan terjadinya kemitraan berdasarkan fungsi masing-masing pelaku (percetakan/ penerbit surat kabar, agen-loper koran). Cara non alami ditempuh melalui penguatan pada sisi pelaku yang lemah dengan bantuan berbagai kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mengingat sebagian besar di Indonesia saat ini masih terdiri dari usaha kecil, maka perhatian khusus pemerintah masih diberikan pada pengembangan usaha kecil. Sasaran kebijaksanaan pemerintah tersebut untuk memberdayakan dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan memajukan masyarakat pedesaan (Hafsah, 2000:63)

6. Prinsip-prinsip Kemitraan

Partnership dalam Hetiefah (2003:139) diartikan sebagai perspektif baru yang merupakan penjabaran dari good governance. Partnership menurut Hetiefah hanya dapat berlangsung apabila ada Trust (kepercayaan) antar para pihak yang terlibat. Pemerintah perlu terlebih dahulu menghilangkan raa ketidakpercayaan komunitas terhadap dirinya. Tanpa itu, prospek menuju good governance sulit dicapai. Dimasa lalu, penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik lain merupakan tanggungjawab dari pemerintah semata. Sektor swasta dan komunitas sendiri tidak banyak terlibat. Sehingga Hetiefah mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip kemitraan antara lain: 1) Kepercayaan atau trust, 2) kesetaraan atau equality dan 3) kemandirian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemitraan antar tiga sektor harus memanfaatkan sumber daya daerah yang terbatas demi mencapai tujuan bersama. Dalam mencapai tujuan ini, ketiga sektor harus saling bekerjasama dan menghargai serta melaksanakan prinsip-prinsip kemitraan.

F. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata sudah diakui sebagai industri terbesar abad ini, dilihat dari berbagai indikator, seperti sumbangan terhadap pendapatan dunia dan penyerapan tenaga kerja (Pitana dan Gayatri, 2005:110). Karena karakteristiknya, pariwisata telah menjadi sektor andalan didalam pembangunan dunia mendatang, peranan pariwisata diprediksi akan semakin meningkat. Pariwisata merupakan konsep yang multidimensional layaknya wisatawan. Yak bisa dihindari bahwa beberapa

pengertian pariwisata dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Secara etimologis, menurut Yoeti (1996:112), istilah pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu “pari” dan wisata”. “Pari” berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Sedangkan “wisata” berarti perjalanan, bepergian yang dalam hal ini bersinonim dengan kata “travel” dalam bahasa Inggris. Berdasarkan pengertian suku kata tersebut maka pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Prof. Salah Wahab dalam Yoeti (1996:116) mengemukakan definisi pariwisata sebagai berikut:

“Pariwisata merupakan suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri (diluar negeri) meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain (daerah tertentu, suatu negara atau benua) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap”.

Belum ada keseragaman batasan dari pengertian pariwisata. Pengertian pariwisata menurut Spillane (1987:21) yaitu “pariwisata adalah suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dalam lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu”.

Menurut Wahab (2003:5), pengertian pariwisata dapat diartikan sebagai satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta

mengaktifkan sektor-sektor produktif lainnya serta merealisasikan industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi.

Pitana dan Gayatri (2005:46) mengemukakan bahwa meskipun ada variasi batasan mengenai pariwisata ada beberapa komponen pokok yang secara umum disepakati didalam memberikan batasan mengenai pariwisata yaitu:

- a. *Traveler*, yaitu orang yang melakukan perjalanan antar dua atau lebih lokalitas
- b. *Visitor*, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya kurang dari 12 bulan dan tujuan perjalanannya untuk terlibat dalam kegiatan mencari nafkah, pendapatan atau kehidupan ditempat tujuan.
- c. *Tourist*, yaitu bagian dari visitor yang menghabiskan waktu paling tidak satu malam didaerah yang dikunjungi.

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan memberikan batasan yang jelas mengenai pengertian wisata, wisatawan, pariwisata dan kepariwisataan, sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau untuk mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan perjalanan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensional serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, akan tetapi kunjungan tersebut semata-mata untuk menikmati perjalanan guna memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Antara lain ingin melihat keindahan alam suatu daerah, mengetahui sejarah, mengetahui seni dan budaya daerah tujuan.

Dengan demikian jelaslah bahwa yang mendorong seseorang melakukan perjalanan wisata sangatlah ditentukan oleh keadaan masing-masing individu, dan mereka juga mempunyai motivasi yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang kehidupan mereka.

2. Pengertian Wisatawan

Pada dasarnya wisatawan berkaitan langsung dengan individu atau pelaku wisata, menurut P.W Ogilvie dalam Yoeti (1996:141) seorang ahli kepariwisataan inggris yang melihat pariwisata dari segi bisnis, memberikan batasan bahwa “wisatawan adalah semua orang yang memenuhi dua syarat, pertama mereka yang meninggalkan rumah kediamannya untuk jangka waktu

kurang dari satu tahun dan kedua, bahwa sementara mereka pergi mereka mengeluarkan uang ditempat yang mereka kunjungi tanpa mencari nafkah di tempat tersebut”. Sedangkan arti wisatawan menurut *International Union Off Official Travel Organization* seperti yang dikutip oleh Pendit (2006:45) yaitu:

“Seseorang atau setiap orang yang mengadakan perjalanan selama 24 jam atau lebih dalam suatu negara yang lain dari pada waktu biasanya ia tinggal dengan tujuan untuk menggunakan waktu senggang untuk rekreasi, berlibur, untuk keperluan kesehatan, untuk menjalankan ibadah, maupun olahraga. Disamping itu untuk keperluan usaha, kunjungan keluarga dan menjalankan tugas-tugas konferensi”.

Sedangkan Dirjen Pariwisata memberikan batasan mengenai wisatawan, dimana Dirjen Pariwisata (1995:4), menyatakan bahwa wisatawan merupakan “orang-orang yang melakukan kegiatan wisata dengan tujuan berlibur, berekreasi, keperluan kesehatan, dan olahraga, memperluas pengetahuan dan pengalaman, kunjungan keluarga, perjalanan religius, keperluan usaha dan menghadiri konferensi”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wisatawan merupakan orang-orang yang melakukan perjalanan karena adanya dorongan-dorongan baik dari individu, kelompok atau masyarakat yang dapat berupa kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan dan kesejahteraan maupun yang bersifat sekedar untuk memperluas ilmu dan menambah pengalaman.

3. Bentuk-Bentuk Pariwisata

Salah Wahab (2003:6) mengkategorikan bentuk-bentuk pariwisata sebagai berikut:

- a) Menurut letak geografis

1. Pariwisata domestik nasional, menunjukkan arus wisata yang dilakukan oleh warga dan penduduk asing yang bertugas disana yang terbatas dalam suatu negara tertentu.
2. Pariwisata regional, yakni kepergian wisatawan terbatas pada beberapa negara yang membentuk suatu kawasan pariwisata, misalnya perjalanan wisatawan dinegara-negara Eropa Barat
3. Pariwisata internasional, yaitu meliputi gerak wisatawan dari suatu negara kenegara lain didunia.

b) Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

Kedatangan wisata luar negeri adalah membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing ini berarti memberi dampak positif terhadap neraca pembayaran luar negeri atau suatu negara yang dikunjungi, yang disebut pariwisata aktif. Sedangkan kegiatan bepergian seseorang warga negara keluar negeri memberikan dampak negatif terhadap neraca pembayaran luar negeri disebut pariwisata pasif.

c) Menurut jangka waktu

Kedatangan seorang wisatawan disuatu tempat atau negara diperhitungkan pula menurut lamanya ia tinggal ditempat atau negara yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka pendek dan pariwisata jangka panjang yang mana tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara untuk mengukur pendek atau panjangnya waktu yang dimaksud.

d) Menurut jumlah wisatawan

1. Pariwisata Individu, yakni hanya seseorang atau satu keluarga yang bepergian
2. Pariwisata rombongan, yakni sekelompok orang yang biasanya terikat oleh hubungan-hubungan tertentu kemudian melakukan perjalanan bersama-sama, misalnya klub, sekolah, atau tor yang diorganisir oleh suatu usaha perjalanan dan biasanya rombongan ini didampingi oleh seorang pemimpin perjalanan. Jumlah peserta rombongan ini bervariasi, biasanya lebih dari 15 – 20 orang peserta.

e) Menurut alat transportasi

Dilihat dari transportasi yang digunakan oleh wisatawan maka kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api dan pariwisata mobil.

4. Jenis-Jenis Pariwisata

Menurut Pendit (2003: 38-41) yang mengemukakan jenis-jenis pariwisata antara lain:

a. Wisata Budaya

Wisata yang berhubungan dengan kebudayaan atau unsur-unsur budaya daerah tujuan wisata. Perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan mengadakan kunjungan keluar negeri misalnya untuk mempelajari keadaan masyarakat, adat-istiadat, dan kebiasaan masyarakat setempat seperti cara hidup, budaya dan seni masyarakat yang dikunjungi.

b. Wisata Kesehatan

Wisata jenis ini ditandai dengan perjalanan dan tinggal sementara di suatu tempat demi kepentingan istirahat dan meninggalkan rutinitas padat sehari-hari yang terjadi ditempat tinggalnya atau tempat dia bekerja. Jenis wisata ini misalnya wisata yang lebih banyak mengandung aktivitas

relaksasi atau pengobatan-pengobatan seperti mengunjungi mata air panas yang mengandung mineral yang bisa menyehatkan.

c. Wisata Komersial

Wisata jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya. Meskipun masih banyak pihak yang menyebutnya bukan suatu kunjungan wisata namun belakangan ini jenis wisata ini masih bisa masuk dalam kategori wisata terutama dikarenakan para pengunjung wisata komersial ini juga menggunakan dan membutuhkan sarana atau fasilitas pendukung sebagaimana wisatawan pada umumnya seperti akomodasi, keperluan transportasi dan sering juga didalamnya disertakan pertunjukan seni khusus sebagaimana terdapat dalam kunjungan wisata lainnya.

d. Wisata Industri

Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

e. Wisata Politik

Jenis ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi peristiwa politik seperti peringatan ulang tahun suatu negara, ulang tahun perayaan 17 Agustus di Jakarta, perayaan 10 Oktober di Moskow, penobatan ratu Inggris di London dan sebagainya dimana fasilitas akomodasi, sarana angkutan dan atraksi aneka warna diadakan secara megah dan meriah bagi para pengunjung.

f. Wisata Pertanian

Seperti halnya wisata industri, wisata pertanian ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang, pembibitan dan sebagainya. Dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat sekeliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur-sayuran dan palawija disekitar perkebunan yang dikunjungi.

g. Wisata Maritim/Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, lebih-lebih didanau, bengawan, pantai, teluk atau laut lepas seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, berkeliling melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah dibawah permukaan air.

h. Wisata Buru

Wisata ini banyak dilakukan dinegeri-negeri yang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.

i. Wisata Pilgrm

Wiata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata pilgrim banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ketempat-tempat suci, kemakam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, kebukit-bukit atau gunung-gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda.

j. Wisata Bulan Madu

yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus yang tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka.

k. Wisata Petualangan

Dikenal dengan istilah Adventure Tourism seperti masuk hutan belantara yang tadinya belum pernah dijelajahi penuh binatang buas, mendaki tebing terjal, terjun kedalam sungai yang amat dalam, arung jeram disungai-sungai yang arusnya liar, masuk goa, dan mencoba wisata kutub.

5. Pengertian Potensi Wisata

Pengertian potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:784) adalah “kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan daya”. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan potensi wisata adalah segaa kemampuan atau daya yang dimiliki yang dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai objek wisata yang dapat dinikmati keindahannya. Potensi wisata ini dapat berupa objek wisata pantai, taman rekreasi dan pemandian, air terjun serta wisata alam (gunung).

Potensi wisata yang dikembangkan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Sehingga pengolahan atau pemanfaatan ini juga harus memperhatikan keseimbangan

lingkungan sebagai tempat terdapatnya objek wisata. Pemanfaatan potensi ini harus dilakukan dengan etika dan niat baik agar bermanfaat karena pemanfaatan yang salah akan menjadi potensi tidak berguna dan merugikan lain pihak.

6. Pengembangan Pariwisata

Didalam kepariwisataan terdapat berbagai macam unsur-unsur yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dimana perubahan terhadap suatu unsur akan dapat berpengaruh terhadap unsur lain. Dalam hal ini pengembangan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan suatu perubahan. Suatu pengembangan yang dilakukan diharapkan mampu menjadikan sesuatu kearah yang lebih baik.

Pengembangan menurut Christie Mill (2000:167) adalah perubahan atau peningkatan yang telah ada kepada tingkat yang lebih baik bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah, dengan pengembangan infrastruktur dan menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan. Sedangkan pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan, segala kegiatan pengembangan mencakup segi-segi yang amat luas, serta menyangkut berbagai segi kehidupan dalam masyarakat, mulai dari kegiatan angkutan, akomodasi, atraksi wisata, makanan dan minuman, cinderamata, pelayanan, suasana kenyamanan dan keamanan.

Menurut Herber dalam Yoeti (2001:160) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara

menyeluruh, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus terintegrasi melalui pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik dan sosial dari suatu negara. Disamping itu rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan kepariwisataan.

Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah merupakan suatu bentuk perubahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan tujuan untuk mewujudkan sesuatu hal tersebut kearah yang lebih baik dengan melalui rencana dan program-program tertentu. Upaya pengembangan industri pariwisata daerah-daerah berkaitan erat dengan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Kualitas sumber daya manusia

Salah satu kunci sukses pariwisata di Indonesia adalah *human resources development* di berbagai subsistem pariwisata tersebut. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan penting dalam pengembangan industri pariwisata terutama ketika pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah. Profesionalsme sumber daya manusia Indonesia merupakan suatu tuntutan dalam menghadapi persaingan global dimana SDM yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam mempunyai gagasan, inovasi dan etos kerja profesional

2. Promosi Kepariwisataan

Upaya-upaya pengenalan potensi-potensi budaya dan alam didaerah-daerah Indonesia dilakukan dengan jalan melakukan promosi kepariwisataan. Dalam hal

ini aspek promosi merupakan salah satu faktor penentu pengembangan sektor pariwisata khususnya di daerah-daerah Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa promosi memainkan peran kunci dalam kinerja masa mendatang sebagai industri pariwisata Indonesia.

3. Sarana dan prasarana kepariwisataan

Motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan akan menimbulkan permintaan-permintaan yang sama mengenai prasarana dan sarana pariwisata seperti jaringan telekomunikasi, akomodasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini kesiapan sarana dan prasarana pariwisata merupakan salah satu faktor penentu berhasil tidaknya pengembangan industri pariwisata daerah, terlebih ketika program otonomi telah diterapkan maka masing-masing daerah dituntut untuk lebih memberikan perhatiannya pada penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataannya yang memadai dan paling tidak sesuai dengan standar internasional.

7. Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sebelum suatu daerah tujuan wisata melakukan promosi pariwisata, maka yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu adalah sarana dan prasarana kepariwisataan yang memadai. Hal ini diperlukan karena seseorang atau sekelompok orang yang menjadi wisatawan sebelum melakukan perjalanan wisata, ia ingin mengetahui terlebih dahulu sudah siapkah daerah tujuan wisata tersebut menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

a) Sarana Pariwisata

Sarana kepariwisataan adalah fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan wisatawan (Yoeti, 1982:184). Yang termasuk kedalam sarana kepariwisataan ada 3 yaitu:

1. Sarana pokok pariwisata

Adalah fasilitas minimal yang harus terdapat pada suatu daerah tujuan wisata. Terdiri dari hotel, penginapan, rumah makan dan lain-lain.

2. Sarana pelengkap pariwisata

Adalah fasilitas-fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok sehingga fungsi sarana pelengkap ini dapat membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah tujuan. Adapun yang termasuk dalam sarana ini adalah sarana musholla, olahraga.

3. Sarana penunjang pariwisata

Adalah sarana yang diperlukan untuk menunjang sarana pokok dan sarana pelengkap agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya ditempat yang dikunjungi, misalnya souvenir.

- b) Prasarana Pariwisata

Menurut Yoeti (1996:189) yang dimaksud dengan prasarana adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya, yang dibagi menjadi:

1. Prasarana Ekonomi

Meliputi sistem perbankan, telekomunikasi, listrik dan sumber air

2. Prasarana Sosial

Meliputi pelayanan kesehatan, petugas yang langsung melayani wisatawan, dan faktor keamanan.

Hal ini juga diungkapkan oleh Lothar A. Kreck dalam Yoeti (2006:180) membagi prasarana pariwisata kedalam dua kelompok, yaitu:

1. Prasarana Perekonomian yang terdiri dari:

- a) Pengangkutan (transportasi) yang dapat membawa wisatawan dari daerah atau negara dimana ia biasanya tinggal, ke daerah atau negara yang merupakan daerah tujuan wisata, seperti pesawat udara, kapal laut, kereta api, bus, taxi dll.
- b) Prasarana Komunikasi, yang bermanfaat agar mendorong para wisatawan untuk mengadakan perjalanan jarak jauh. Dengan adanya prasarana komunikasi komunikasi wisatawan dapat berkomunikasi dengan keluarganya di negara asalnya. Yang termasuk dalam prasarana ini adalah telepon, radio, TV, surat kabar dll.
- c) Kelompok prasarana yang tergolong utilitas yaitu kelompok prasarana yang sifatnya sangat mendasar. Yang termasuk dalam hal ini adalah penerangan listrik dan persediaan air.
- d) Perbankan, dengan adanya pelayanan bank wisatawan mendapat jaminan untuk dengan mudah menerima atau mengirim dari dan luar dimana tempat mereka tinggal.

2. Prasarana Sosial

Prasarana sosial adalah semua faktor yang menunjang kemandirian atau menjamin kelangsungan prasarana perekonomiannya ada. Yang termasuk prasarana sosial adalah:

- a) Pelayanan kesehatan. Adanya jaminan bahwa di daerah tujuan wisata tersedia pelayanan bagi suatu penyakit yang mungkin diderita oleh wisatawan. Misalnya rumah sakit atau puskesmas.
- b) Faktor keamanan. Petugas yang ada dan langsung siap melayani wisatawan seperti polisi dll.

Dan dapat disimpulkan bahwa tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam bidang pariwisata akan dapat memberikan daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung pada daerah tujuan wisata yang ada.

8. Paradigma Baru Pengembangan Pariwisata

Pariwisata sering kali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Namun pada prinsipnya, pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara. Pembangunan kepariwisataan menurut Nirwandar (2006) pada dasarnya ditujukan untuk:

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pariwisata mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke segala penjuru negeri. Sehingga dengan banyaknya warga yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan menimbulkan rasa persaudaraan dan pengertian terhadap

sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

2. Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*)

Pengembangan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata memberikan andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang memiliki potensi ekonomi lain selain ekonomi potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

3. Pengembangan Berkesinambungan (*Sustainable Development*)

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah-tamahan pelayanan, sedikit sekali sumber daya yang habis dipergunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik. Kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan didaerahnya.

4. Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*)

Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu daerah atau negara yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah.

5. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Asasi Manusia

Pariwisata pada masa kini telah mampu menjadi kebutuhan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu, kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak asasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema *paid holidays*.

6. Peningkatan Ekonomi Industri

Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi disuatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal itu adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan yang berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas.

7. Pengembangan Teknologi

Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya.

Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan

dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

G. Peningkatan Peran Swasta dan Masyarakat

Peningkatan sektor pariwisata tidak berjalan dengan baik tanpa adanya peranserta pihak lain, manfaat yang optimal hanya bisa dicapai apabila pemberdayaan masyarakat dalam hal ini lebih menitikberatkan pada peningkatan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pariwisata, tidak lain adalah usaha membuka akses atau kekuasaan, sumber daya serta kerjasama dengan pemerintah dan swasta. Peran serta masyarakat dapat terwujud karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yaitu melalui terbukanya kesempatan kerja dan usaha wisata sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka. Dengan demikian diharapkan situasi tersebut akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk berperan didalamnya, baik secara aktif maupun pasif.

Peran aktif dilaksanakan secara langsung baik dilakukan secara perorangan maupun bersama-sama. Peran ini secara sadar ikut membantu program pemerintah dengan inisiatif dan kesiapan mau melibatkan diri dalam kegiatan perusahaan pariwisata melalui pembinaan rasa ikut memiliki dikalangan masyarakat. Peran pasif adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan alam serta masyarakat cenderung sekedar melaksanakan perintah dan mendukung terpeliharanya sumber daya alam. Upaya peningkatan peran serta pasif dapat dilakukan dengan penyuluhan maupun dialog dengan pemerintah, penyebaran

informasi mengenai pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam disekitar kawasan objek wisata yang juga mempunyai dampak positif terhadap perekonomian.

Adapun peran serta masyarakat dalam kepariwisataan menurut Harun (2004:14) dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Masyarakat Sadar Wisata

Sadar wisata merupakan pemahaman akan arti dari pengembangan pariwisata tetapi lebih jauh lagi dapat diartikan sebagai peranan, posisi dan misi wisata dalam pembangunan nasional. Masyarakat sadar wisata dimaksudkan untuk menumbuhkan pengertian bahwa masyarakat lebih memahami dan mengetahui tugas dan fungsi pembangunan pariwisata beserta permasalahan yang dihadapi.

2. Tingkat Kesadaran Wisata

Pengembang pariwisata secara nyata akan melibatkan semua lapisan masyarakat mulai dari kalangan atas sampai pada lapisan paling bawah atau seringkali disebut *stakeholder* pelaku pariwisata yang meliputi kalangan pemerintah, pelaku usaha/industri pariwisata dan usaha terkait serta masyarakat luas. Sehingga seluruh *stakeholder* diharapkan turut membantu dan memberikan dukungan terhadap pengembangan pariwisata. Sikap dan tindakan seluruh stakeholder pelaku pariwisata akan berkembang kearah yang positif apabila berperan dalam kegiatan pengembangan pariwisata.

3. Menggalang Peran Serta Masyarakat

Dalam kepariwisataan pengertian masyarakat dapat diidentifikasi sebagai tiga komponen yaitu *stakeholder* pelaku pariwisata yang memiliki pemerintah, industri/usaha pariwisata dan masyarakat luas.

Selain itu keberadaan media sangat dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata untuk memberikan informasi potensi pariwisata bagi masyarakat luas sebagai pemerhati masalah dan hambatan pengembangan pariwisata. Oleh karena itu menggiatkan sektor pariwisata selain dengan mengadakan pembenahan fisik juga perlu menumbuhkan sikap dan kesadaran masyarakat. Selain itu peran swasta dalam pengembangan pariwisata juga sangat penting, dimana pemerintah juga bekerja sama dengan pihak swasta pembangunan infrastruktur , sarana dan prasarana penunjang pariwisata serta investasi dalam bidang pariwisata.

H. Peran Dinas Pariwisata Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata

Menurut Soekanto (1987:3) peranan diartikan sebagai tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu proses pencapaian tujuan. Dinas Pariwisata Daerah dalam rangka pengembangan sektor pariwisata yang memiliki fungsi dan peranan untuk dapat memanfaatkan seoptimal mungkin potensi yang dimiliki daerahnya.

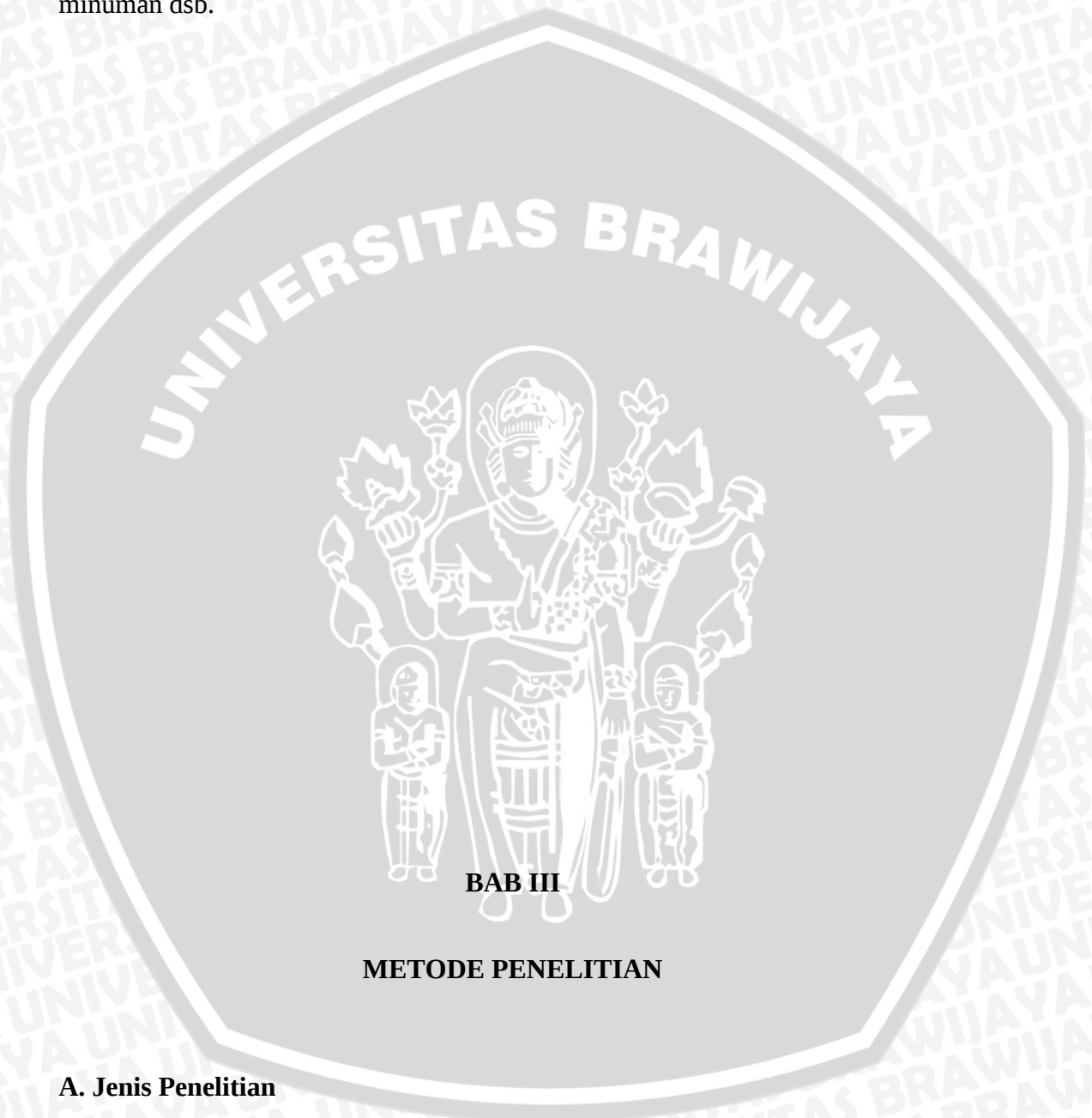
Selo Sumardjan dalam Spilline (1994:133) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata harus mempunyai pengembangan yang berencana serta menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat,

baik dari segi ekonomi, sosial, budaya. Peranan Dinas Pariwisata dalam pengawasan pariwisata dalam garis besar adalah menyediakan infrastruktur, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana angkutan, keadaan infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata yang menuju ke daerah wisata tersebut. Berdasarkan surat keterangan Menteri Perhubungan No.5 K 72/U/1996 Tentang Ketentuan Pokok Badan Pengembangan Pariwisata menetapkan tugas badan pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan penelitian, merumuskan dan mengusulkan kebijakan kepariwisataan kepada tingkat kepala-kepala daerah sehingga tercapai suatu usaha yang terkoordinasi dan terarah menuju pengembangan pariwisata daerah.
2. Menggerakkan dan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di daerah yang dapat diarahkan menjadi pengembangan kepariwisataan di daerah kepada kepala daerahnya.
3. mengoordinasi pelaksanaan pengembangan pariwisata yang diselenggarakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.

Peranan Dinas Pariwisata Daerah dalam hal ini adalah mengatur dan mengadakan promosi umum kedaerah lain dan memberikan pembinaan kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam sektor pariwisata. Dengan cara ini diharapkan upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata Daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Upaya pengembangan pariwisata merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk

pengembangan objek wisata dan daya tarik wisata, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan aksesibilitas dan pariwisata, usaha makanan dan minuman dsb.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono, 2005:1).

Metode merupakan suatu cara atau upaya yang digunakan untuk mencapai tujuan .

metode penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam penelitian karena metode penelitian tersebut digunakan dalam pengumpulan data, menginterpretasi data dan menganalisis masalah. Agar penelitian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan maka dibutuhkan penggunaan metode penelitian yang tepat. Dengan metode penelitian, peneliti dapat menentukan arah kegiatan penelitian yang akan dilakukan sehingga peneliti dapat mencapai tujuan penelitian yang diinginkan.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogman dan Taylor dalam buku karya Bagong Suryanto (2008:166) adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Dengan kata lain pendekatan kualitatif yang dilakukan merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk menggambarkan kejadian baik secara tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati pada saat penelitian dilakukan untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiono (2008:8) sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah yang disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya serta metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam usaha uraian yang sistematis, faktual, akurat, dan jelas serta bisa terkait dengan hubungan yang timbul antara gejala dengan gejala masyarakat. Uraian gambaran yang dihasilkan dari data deskriptif sebagaimana yang diidentifikasi diatas didukung pula oleh keberadaan bentuk data lain seperti dokumen atau laporan-laporan yang terkait baik kalimat atau kata maupun angka-angka yang dapat diformulasikan dalam bentuk angka-angka.

Dengan demikian, penelitian ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi dan mendeskripsikan tentang bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam meningkatkan perekonomian Kota Batu sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar daerah pariwisata Kota Batu. Dengan demikian maka penggunaan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode yang cocok untuk mengetahui tentang **“Kemitraan Pemerintah Kota Batu Dengan Jawa Timur Park 1 Dalam Meningkatkan Perekonomian Kota Batu”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memfokuskan penelitian yang dilakukan. Menurut Faisal (1994:4), fokus penelitian adalah penelitian awal yang dipilih untuk meneliti bagaimana memfokusnya. Fokus penelitian yaitu suatu pembatasan masalah-masalah yang dibahas dalam metode penelitian kualitatif yang memiliki fungsi untuk membatasi studi dalam melakukan penelitian. Menurut Moleong (2009:237), penelitian

kualitatif memiliki dua tujuan yaitu pertama, penetapan fokus pembatasan studi berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat penelitian menjadi layak. Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi peneliti dan fokus. Dengan demikian bagaimanapun penetapan fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batasan penelitian.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pola/gambaran kemitraan yang terjalin antara Jawa Timur Park 1 dengan Pemerintah Kota Batu
2. Kontribusi Jatim Park 1 dalam meningkatkan perekonomian Kota Batu
 - a. Sebelum adanya Jatim Park
 - b. Sesudah adanya Jatim Park
3. Faktor pendukung dan penghambat kemitraan Jatim Park 1 dengan Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan perekonomian Kota Batu
 - a. Faktor pendukung
 - b. Faktor penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian akan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah serta fokus penelitian yang telah diterapkan. Dalam hal ini, peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Kota Batu. Alasan pemilihan lokasi ini adalah Kota Batu memiliki potensi wisata yang beraneka ragam yang patut untuk dikunjungi.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah merupakan tempat dimana peneliti dapat mengungkapkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun situs penelitian adalah Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, Kantor Jawa Timur Park 1 dan masyarakat sekitar daerah wisata Kota Batu.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian pada objek wisata Jawa Timur Park 1 adalah karena Jawa Timur Park 1 merupakan pelopor dibangunnya tempat wisata yang berskala internasional yang mengusung konsep Fun and Study. Begitu pula karena Jawa Timur Park 1 berhasil mengembangkan perusahaannya di bidang pariwisata yang dapat menjadi salah satu desinasi pariwisata yang paling digemari di Kota Batu. Sedangkan alasan memilih kantor Dinas Pariwisata

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana peneliti dapat memperoleh data-data yang diperlukan (Arikunto, 2002:90). Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2000:112) adapun sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah data-data dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Sedangkan untuk jenis data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan jenis penelitian ini, data yang diperoleh dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang berhubungan dengan objek peneliti maupun permasalahan yang ada. Data primer merupakan data pokok yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dan alat

bantu lainnya yang dapat memberikan informasi. Dalam penelitian ini data primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan:

- 1) Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu
- 2) Staff Dinas Pariwisata Kota Batu
- 3) Humas Dinas Pariwisata Kota Batu
- 4) Manajer Marketing Jatim Park Group
- 5) Manajer Operasional Jatim Park Group
- 6) Masyarakat Desa Wisata Kota Batu

2. Data Sekunder

Yaitu merupakan data pendukung atau pelengkap data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi catatan, laporan serta arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data sekunder juga dapat diperoleh dari publikasi ilmiah maupun jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti dalam mencari dan memperoleh data. Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan untuk melihat secara langsung terhadap situasi dan kondisi didalam lingkungan objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung secara lisan kepada pihak-pihak terkait yang dapat memberikan informasi penelitian

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, mencatat dan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa arsip-arsip dan catatan-catatan yang menjadi bahan masukan dalam penyusunan penelitian. Dalam hal ini meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah pengembangan pariwisata.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Arikunto dalam Hasan (2002: 76) adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, sebagai instrumen kunci dengan segenap aktivitasnya dalam menyerap dan mengambil data dilapangan.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*), merupakan petunjuk atau pedoman yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan wawancara langsung dengan responden terkait dengan masalah yang diteliti.
3. Catatan lapangan (*field note*), berisi tentang pokok-pokok informasi yang diperoleh selama peneliti melakukan wawancara dan observasi.

G. Analisis Data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sebuah penelitian kualitatif, proses analisa dan interpretasi data tak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data atau berdiri sendiri, namun secara simultan juga sudah mulai dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung dilapangan. Lebih jauh, analisa yang dikembangkan dalam penelitian ini harus dilakukan berdasarkan pertimbangan logika yang rasional serta mengandalkan teori atau dalil yang berlaku secara umum. Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif, dalam model ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Hubberman, 1992:20). selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan secara interaktif ketiga komponen utama tersebut:

1. Reduksi data

merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dalam hal ini, reduksi data berlangsung secara terus menerus selama kegiatan

2. Penyajian data

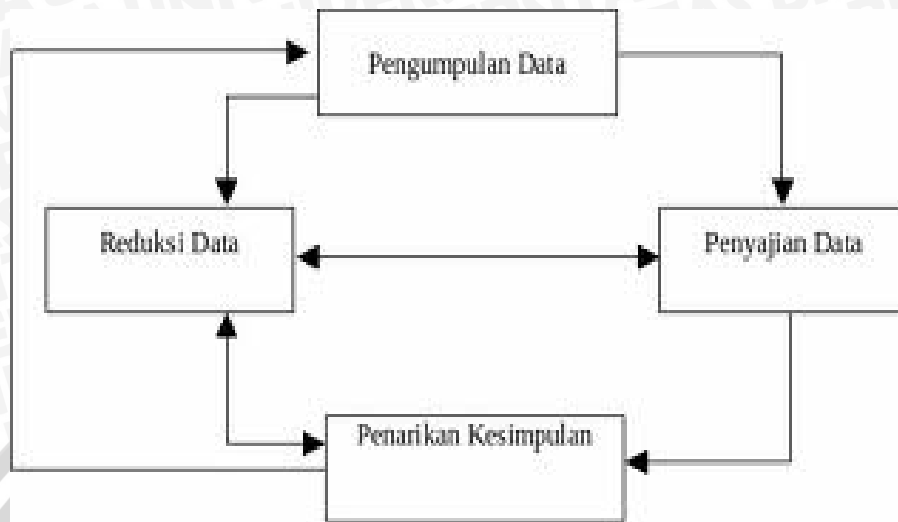
Adalah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Dimaksudkan untuk memudahkan bagi penelitian guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Bentuknya dapat diikuti gambaran atau skema dan beberapa tabel yang dirancang untuk menyusun agar dapat dimengerti.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah data dikumpulkan dan dianalisa maka dapat ditarik kesimpulan, namun kesimpulan akhir itu mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, oleh karena itu kesimpulan tersebut diverifikasi yaitu berupa pengumpulan data atau dapat juga dengan melakukan salinan dalam satuan data yang lain. Pada dasarnya data harus di uji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil lebih kuat.

Analisa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisa data dengan memperhatikan poin-poin diatas adalah analisis deskriptif, yaitu usaha untuk menganalisa data dengan menggambarkan fakta yang ada. Ketiga jenis kegiatan analisis data tersebut merupakan proses siklus dan interaktif.

Gambar 2. Metode Pengumpulan Data Milles and Hubberman



Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kota Batu

a. Sejarah Berdirinya Kota Batu dan Pemerintahan Kota Batu

Wilayah Batu dan sekitar nya sejak abad ke 10 sudah terkenal di kalangan kerajaan sebagai tempat peristirahatan, karena wilayah nya yang berada di daerah pegunungan dengan kesejukan dan dinginnya udara yang ditambah lagi dengan keindahan pemandangan alamnya sebagai ciri khas daerah pegunungan. Pada waktu pemerintahan Raja Sindok, seorang petinggi kerajaan bernama Empu Supo diperintah Raja Sindok untuk untuk membangun tempat peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang didekatnya terdapat sumber mata air. Dengan usaha yang keras akhirnya Empu Supo berhasil menemukan kawasan yang sekarang dikenal dengan kawasan Wisata Songgoriti. Atas persetujuan Raja Sindok maka dibangunlah kawasan peristirahatan keluarga kerajaan di Songgoriti tersebut serta dibangunnya sebuah candi yang diberi nama Candi Supo. Sebagaimana yang diperintahkan Raja Sindok kepada Empu Supo, ditempat peristirahatan tersebut terdapat sumber mata air yang sejuk dan dingin seperti mata air pegunungan pada umumnya. Mata air itu digunakan untuk mencuci keris-keris bertuah sebagai benda pusaka kerajaan Sindok. Konon katanya karena sumber mata air itu sering digunakan untuk mencuci keris dan neda pusaka kerajaan Sindok yang mempunyai kekuatan dahsyat, akhirnya sumber mata air yang semula terasa dingin dan sejuk akhirnya berubah menjadi sumber air panas. Yang sampai saat ini menjadi sumber mata air panas abadi di kawasan Wisata Songgoriti.

Berdasarkan kisah-kisah orang tua dan dokumen yang ada maupun dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui pasti tentang kapan nama

“BATU” mulai disebut untuk menamai kawasan yang terletak di lereng gunung Panderman dengan ketinggian 700-1100 dpl ini. Dari beberapa pemuka masyarakat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan budaya Jawa yang sering memperpendek atau mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau Batu sebagai sebutan yang digunakan untuk Kota Dingin di Jawa Timur.

Sebagai layaknya wilayah pegunungan pada umumnya yang wilayahnya sejuk dan subur, Batu juga memiliki pemandangan alam yang indah dan berudara sejuk, tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat lain untuk datang berkunjung dan menikmati Batu sebagai kawasan pegunungan yang mempunyai daya tarik tersendiri. Oleh karena itu pada awal abad 19 Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itu membangun tempat peristirahatan (*villa*) dan bahkan bermukim di Batu. Situs dan bangunan peninggalan zaman Belanda atau pada masa pemerintahan Hindia Belanda saat ini masih ada dan menjadi aset dari kunjungan wisata Kota Batu hingga saat ini. Begitu kagumnya bangsa Belanda atas keindahan dan keelokan Kota Batu sehingga bangsa Belanda mensejajarkan wilayah Batu dengan sebuah negara Eropa yaitu Switzerland dan memberikan predikat sebagai *De Klein*

Switzerland atau Swiss Kecil di Pulau Jawa (<http://batukota.go.id/statis-12-sejarahkotabatu.html> diakses tanggal 13/12/2013 pukul 10.00)

Kota Batu tidak terlepas dari sejarah pemerintahannya. Berikut ini merupakan perkembangan sekilas sejarah berjalannya Pemerintahan Kota Batu, yaitu:

1. Kota Batu adalah sebuah kecamatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Malang. Pada perkembangannya, Kota Batu menjadi bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan I (SSWP) Malang Utara.
2. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1993 tepatnya pada tanggal 6 Maret 1993 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.12 Tahun 1993 Tentang Peningkatan Status Kecamatan Batu menjadi Kotatiff Batu maka berubahlah status dari kecamatan Batu menjadi Kota Administratif Batu.
3. Pada tahun 1993-2001 dengan berubahnya status Batu menjadi Kota Administratif (1993) yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu kecamatan Batu, Bumiaji, dan Kec.Junrejo. dan pejabat Walikota pertama yaitu Drs. Chusnul Arifin Damuri. Seiring perkembangan Otonomi Daerah dan semangat masyarakat Batu untuk mandiri, maka pada tahun 2001 tepatnya pada tanggal 17 Oktober, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu maka secara resmi jadilah Kota Batu sebagai daerah Otonom baru
4. 2001-sekarang. 17 Oktober 2001 merupakan hari yang bersejarah khususnya bagi masyarakat Kota Batu karena pada hari itu merupakan hari lahirnya Pemerintah Kota Batu sebagai kota otonom. Pada tanggal 22 Oktober 2002 Gubernur Jawa Timur atas nama Menteri Otonomi Daerah melantik Drs. Imam Kabul sebagai Walikota Batu untuk masa jabatan 2002-2007.

Aspek-aspek yang mendukung peningkatan status Kota Administratif Batu menjadi Pemerintah Kota Batu yaitu:

1. Aspek sosiologis bahwa perubahan Kota Administratif Batu merupakan embrio sosiologis dari pembentukan kotamadya.
2. Aspek pelayanan bahwa kedekatan efisiensi dalam pelayanan masyarakat
3. Aspek ekonomi bahwa andalan pariwisata Jawa Timur dan agrobisnis
4. Aspek politis bahwa keputusan politis yang harus dipertanggungjawabkan secara politis.
5. Aspek hukum setelah adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa status Kota Administratif Batu tinggal dua pilihan, menjadi kecamatan atau ditingkatkan menjadi pemerintah kota.

Ada tujuh faktor pendukung peningkatan status Kota Administrasi Batu menjadi Pemerintah Kota Batu berdasarkan catatan Pemerintah Kota Bat, yaitu:

1. Faktor ekonomi, dimana sebagian besar masyarakat bergerak dalam bidang pertanian, perdagangan dan jasa pariwisata.
2. Potensi daerah, sebagai daerah yang subur dan berhawa dingin dengan keindahan panorama alamnya yang menjadi sentra pariwisata di Jawa Timur dan menjadi pusat persinggahan wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
3. Faktor sosial budaya, adanya masyarakat yang bercorak agamis dengan data 93% beragama islam dan kehidupan yang rukun antar umat beragaa dengan beragam dan berbagai fasilitas keagamaan (Masjid, Musholla,

Gereja, Wihara da Pura) serta berbagai macam budaya yang berkembang seperti kuda lumping, seni tari dan terbang jidor.

4. Faktor sosial politik, dimana pengembangan pemerintahan di Kota Administratif Batu sangat pesat, peran serta tokoh politik dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat.
5. Faktor jumlah penduduk yang mencapai 158.854 jiwa dengan sumber daya manusia cukup dan berpartisipasi masyarakat yang baik.
6. Luas daerah, dengan luas daerah 157,37 km² terbagi menjadi tiga kecamatan. Antara lain Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji
7. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dimana pada tahun 2001 berjumlah Rp.4.485.390.345,00 dan pada tahun 2002 sebesar Rp.5.203.841.985,97.

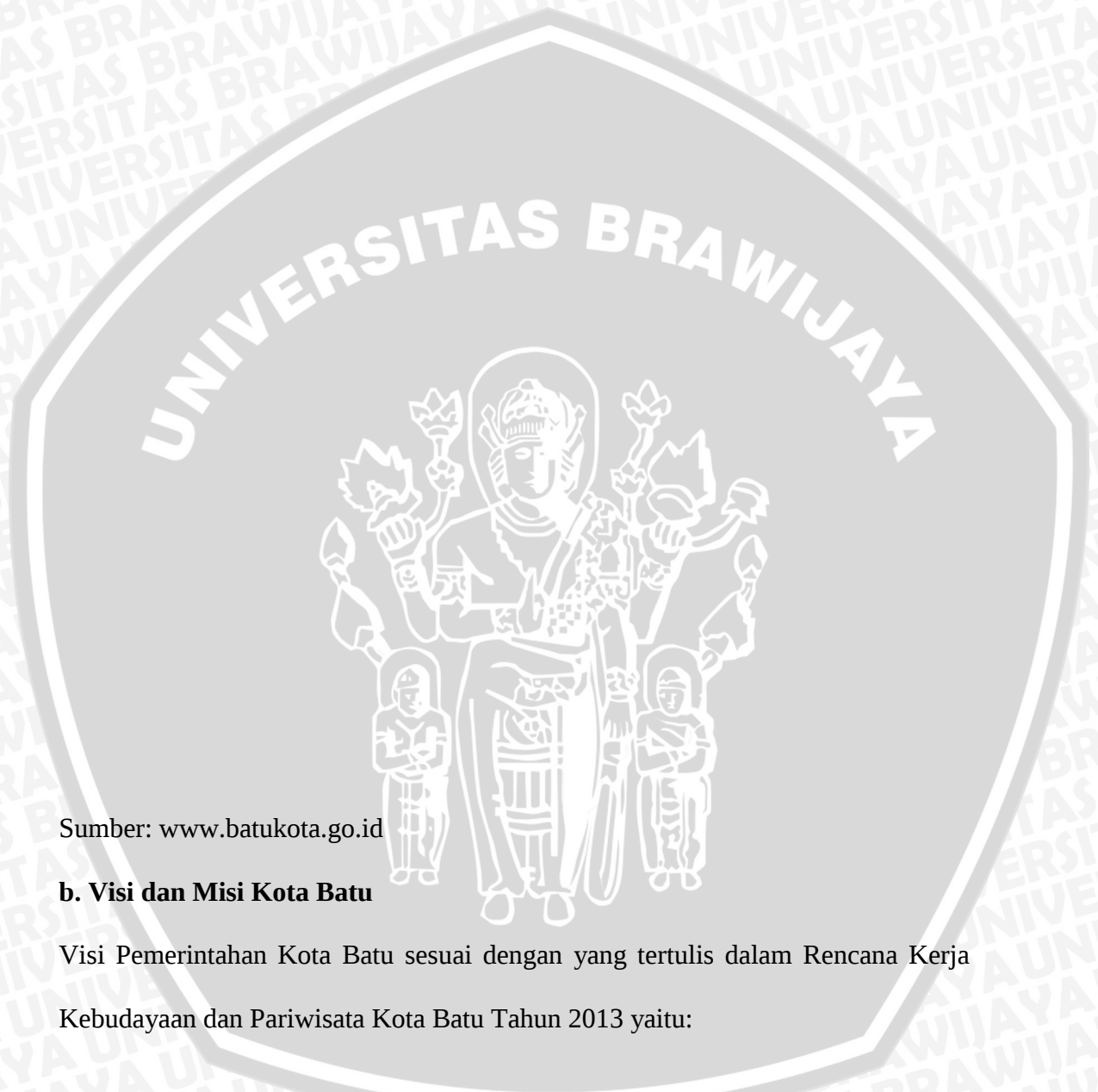
Dengan adanya peningkatan status kota administratif Batu menjadi Pemerintah Kota Batu diharapkan pertama, administratif Pemerintah Daerah dapat lebih efisien dan efektif karena dengan desentralisasi maka daerah tersebut lebih mandiri dalam manajemen pemerintahannya tanpa harus menunggu petunjuk atau restu dari pusat. Kedua, mampu mempercepat efektifitas pengelolaan dan pengembangan sumberdaya alam untuk kemakmuran seluruh masyarakat di daerah, karena hasil-hasil daerah itu langsung dapat dikelola oleh daerah itu sendiri tanpa harus menyeter ke pusat terlebih dahulu. Ketiga, bisa meningkatkan kualitas penyebaran dan percepatan pembangunan daerah. Seperti diketahui bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui apa yang diperlukan oleh rakyatnya bukan pemerintah pusat, sehingga desentralisasi kewenangan jelas akan

memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melakukan yang paling tepat untuk rakyatnya. Keempat, semakin mendekatkan pusat pelayanan kepada masyarakat. Suatu pemerintah daerah yang otonom, pusat pelayanan publik yang dibangun pemerintah kota dapat lebih cepat dijangkau oleh masyarakatnya daripada keadaan sebelumnya karena panjangnya rentang kendali pemerintahan. Kelima, dapat menumbuhkembangkan kehidupan demokratis, karena masyarakat kota mempunyai pemerintahan sendiri dengan legitimasi dari masyarakat maupun berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.



Gambar 3. PETA KOTA BATU





Sumber: www.batukota.go.id

b. Visi dan Misi Kota Batu

Visi Pemerintahan Kota Batu sesuai dengan yang tertulis dalam Rencana Kerja Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu Tahun 2013 yaitu:

“Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional Yang Didukung Oleh Pendidikan Yang Tepatguna dan Berdaya Saing Ditopang Sumberdaya (Alam, Manusia Dan Budaya) Yang Tangguh Diselenggarakan Oleh Pemerintahan Yang Baik, Kreatif, Inovatif,

Dijiwai Oleh Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Batu, maka dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan kedalam misi Kota Batu Tahun 2012-2017, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama
2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
3. Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik
4. Meningkatkan Posisi Peran Dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional
5. Optimalisasi Pemerintahan Daerah
6. Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Lembaga Pendidikan
7. Peningkatan Kualitas Kesehatan
8. Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah , Fasilitas Publik, Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas
9. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
10. Menciptakan Stabilitas Dan Kehidupan Politik Di Kota Batu Yang Harmonis Dan Demokratis
11. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Dan UKM

c. Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif

Secara geografis Kota Batu terletak pada posisi antara 122°17', 10,9° sampai dengan 122°57', 10,90' Bujur Timur dan 7°44', 55,11' sampai dengan 8°26', 35,45' Lintang Selatan. Kota Batu merupakan salah satu bagian dari

wilayah Propinsi Jawa Timur yang mempunyai luas secara keseluruhan adalah sekitar 20.280 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 178.689 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 1,83% pertahun.

Adapun batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pauruan
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Malang
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Malang
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sumber: Kota Batu Dalam Angka 2013

Kota Batu dulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malan. Kemudian statusnya ditingkatkan sebagai Kota Administratif. Pada tanggal 21 Juni 2001, Batu ditetapkan sebagai kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001. Secara administrasi Kota Batu terdiri atas 3 wilayah kecamatan yang dibagi menjadi 20 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan di Batu adalah Batu, Bumiaji, dan Junrejo.

d. Keadaan Topografi dan Klimatologi

Keadaan topografi Kota Batu memiliki dua karakteristik yang berbeda yaitu sebelah utara dan barat merupakan daerah yang bergelombang dan berbukit, sedangkan daerah timur dan selatan merupakan daerah yang relatif datar meskipun masih berada pada ketinggian 700 m dari permukaan laut.

Keadaan klimatologi Kota Batu memiliki suhu minimum 24-18°C dan suhu maksimum 32-28°C dengan kelembapan udara sekitar 75-98% dan curah hujan

rata-rata 298 mm perbulan dengan hari hujan rata-rata 6 hari perbulan sehingga Kota Batu tidak memiliki perubahan musim yang drastis antara musim kemarau dan musim penghujan.

e. Potensi Pariwisata di Kota Batu

Kota Batu memiliki berbagai macam potensi wisata yang dapat menarik wisatawan. Baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Berbagai macam potensi wisata yang dimiliki Kota Batu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dikarenakan wisatawan dapat memilih objek wisata mana yang ingin dikunjungi. Potensi wisata yang dimiliki Kota Batu diantaranya terdiri dari wisata alam dan buatan. Berikut ini merupakan potensi wisata yang dimiliki oleh Kota Batu:

1. Wisata alam

Kondisi geografis Kota Batu yang dikelilingi pegunungan sangat cocok untuk berwisata alam. Bagi pengunjung yang ingin melepaskan kepenatan atau melakukan aktifitas berkemah sekaligus mengunjungi Air Terjun Coban Rondo, Air Terjun Coban Talun dan Coban Rais. Bagi pengunjung yang ingin merasakan aliran air panas alami yang bersumber dari Gunung Arjuna dapat mandi dan berenang di Pemandian Air Panas Cangar.

2. Wisata Rekreasi

Seiring perkembangan Kota Batu telah dibangun tempat-tempat rekreasi wisata pendidikan dan wisata keluarga untuk menambah daya tarik wisata Kota Batu seperti Jatim Park dan Taman Satwa dengan Konsep “Taman Belajar dan

Rekreasi” sangat cocok untuk pengunjung keluarga selain rekreasi wisata keluarga lainnya.

3. Wisata Sejarah

Di Kota Batu terkenal dengan wisata sejarahnya antara lain Candi Songgoriti, Patung Ganesha yang merupakan situs peninggalan sejarah jaman Kerajaan Songgoriti. Peninggalan-peninggalan jaman Belanda dan Jepang seperti Hotel Kartika Wijaya, Makam Tua Denger, Goa Jepang Cangar, Goa Jepang coban Talun dan Goa Jepang Tlekung menambah keanekaragaman wisata sejarah di Kota Batu. Di Seleka juga ada peninggalan Presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno berupa kenangan kata-kata tentang keindahan Kota Batu.

4. Wisata Ziarah

Masyarakat Kota Batu sangat menghormati leluhur mereka dulu, sehingga makam mereka sangat lekat dengan baik dan bersih. Makam Mbah Wastu yang terletak di Kecamatan Bumiaji merupakan cikal bakal nama Kota Batu. Ada juga pesarehan Mbah Pathok yang konon merupakan orang pertama yang membuka jalan di daerah Songgoriti.

5. Wisata Agro

Kota Batu terkenal identik dengan agro wisatanya antara lain bunga, apel, strawberry dan sayur mayur. Wisata petik apel dan strawberry langsung dari pohon sebagai salah satu andalan wisata agro di Kota Batu dapat ditemui di kawasan Kecamatan Bumiaji dan Kusuma Agro Wisata. Di kawasan Desa Sumberbrantas juga banyak kita temui hasil pertanian seperti wortel, sayur mayur, kentang, sawi dan masih banyak lagi hasil pertanian yang dihasilkan.

6. Wisata Budaya

Kebudayaan merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia. Di Kota Batu kebudayaan tradisional tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai suatu tradisi budaya yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Keindahan tradisi budaya Kota Batu dapat dilihat dari tari-tarian khas Kota Batu, sedekah bumi, kegiatan bersih desa dan pentas ludruk serta campur sari.

7. Wisata Minat Khusus

Bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu dan ingin menguji adrenalin, Kota Batu memiliki objek wisata yang mendukung antara lain paralayang, arung jeram, mountain bike. Kondisi alam Kota Batu memiliki daya tarik tersendiri jika dilihat dari atas langit melalui paralayang akan begitu indah panoramanya, juga aliran sungai Brantas yang melalui hutan dapat dinikmati dengan arung jeram begitu pula dengan mountain bike dengan track dilekangi Gunung Panderman dan Gunung Banyak.

8. Wisata Religi

Wisata religi merupakan salah satu objek dan daya tarik wisata mengenai seni arsitektur bangunan tempat peribadatan agama di Kota Batu. Hal ini menggambarkan kerukunan hidup dan toleransi umat beragama yang ada di Kota Batu. Keberadaan bangunan dan tempat beribadah sangat terawat dan terjaga dengan baik. Agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha maupun Konghucu begitu erat hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya.

9. Wisata Kuliner

Beraneka ragam makanan khas Kota Batu dapat kita jumpai disini. Bagi para penikmat wisata kuliner tersedia makanan dan minuman khas Kota Batu seperti sop buntut, gurami bakar, sate kelinci, bebek kualo, ayam goreng dll.

10. Wisata Goa

Pada masa pendudukan Tentara Jepang di Indonesia meninggalkan peninggalan bersejarah di Kota Batu berupa Goa Jepang yang terletak di daerah Cangar Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji dan Coban Talun juga terdapat di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo. Goa Jepang pada masa itu digunakan sebagai tempat persembunyian Tentara Jepang.

11. Wisata Husada

Wisata Husada merupakan wisata yang sangat diminati bagi para wisatawan khususnya bagi mereka yang sangat mengagumi tanaman obat herbal seperti kunir, jamu, temulawak, dll. Wisata tersebut dapat dijumpai di Balai Materi Jl. Lhor Panglima Sudirman Kota Batu.

12. Wisata Souvenir

Kota Batu juga terkenal dengan beraneka ragam macam industri kerajinan yang telah dihasilkan oleh pengrajin Kota Batu. Kerajinan ini terdapat di Kecamatan Junrejo seperti onyx, entong, irus (peralatan dapur yang terbuat dari kayu), gerabah dan souvenir lainnya dan juga merupakan objek daya tarik wisata tersendiri bagi para peminat souvenir.

2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

a. Sejarah Singkat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Pembangunan daerah merupakan integral dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Batu seperti daerah-daerah lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kota Batu. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki merencanakan, mengolah dan mengendalikan pembangunan daerah yang lebih demokratis, desentralisasi, partisipasi, terbuka dan tanggung jawab.

Pengembangan kepariwisataan Kota Batu sebagai bagian integral dari seluruh aspek pembangunan daerah Kota Batu didasarkan kepada arah kebijakan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Karena itu perludilakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efisiensi, akuntabilitas kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Untuk menjalankan kewenangan di bidang pariwisata serta untuk meningkatkan kelancaran tugas-tugas teknis operasional dibidang pariwisata itulah maka dibentuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu No.15 Tahun 2003 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

b. Visi dan Misi

Seperti yang diketahui visi Pemerintah Kota Batu adalah “Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional yang Ditunjang Oleh Pendidikan Yang Tepat Guna dan Berdaya Saing Ditopang Oleh Sumberdaya (Alam, Manusia dan Budaya) Yang Tangguh Diselenggarakan Oleh Pemerintahan Yang Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai Oleh Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” maka, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu dalam mengantisipasi perkembangan Kota Batu saat ini menetapkan Visi dan misinya sebagai satu kesatuan seperti yang tertuang dalam Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu diharapkan mampu berperan menentukan dinamika perubahan lingkungan strategis. Sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak menuju masa depan yang lebih baik.

Visi yang dimaksud adalah merupakan cara pandang jauh kedepan yang pada akhirnya dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka dirumuskan visi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Batu adalah sebagai berikut: **“Terwujudnya Kota Wisata Batu Sebagai Sentra Pariwisata Yang Unggul”**. Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Batu perlu menetapkan misi secara jelas sebagai suatu pernyataan yang menetapkan tujuan dari sasaran yang ingin dicapai.

Pernyataan misi juga diharapkan mampu membawa organisasi pada suatu fokus yang dapat memberikan penjelasan tentang keberadaan organisasi, kegiatan apa yang dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Misi juga merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan makna dan ciri visi maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu merumuskan misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata yang berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan SDM yang berkompetensi yang mampu bersaing ditingkat global
3. Mengembangkan desa/kelurahan menjadi desa wisata yang berbasis potensi dan masyarakat
4. Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholders pariwisata baik ditingkat regional, nasional dan internasional
5. Melakukan promosi pariwisata secara kontinyu baik nasional maupun internasional.

Keberhasilan pelaksanaan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, disamping mengandalkan kemampuan sumberdaya organisasi juga sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk mencermati kondisilingkungan yang berada di sekitar organisasi yang senantiasa cenderung berubah dan berkembang.

c. Tugas, Pokok dan Fungsi Dispartabud Kota Batu

Dinas Pariwisata Kota Batu sebagai salah satu komponen pariwisata dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi lebih bertindak sebagai regulator, innovator, koordinator dan fasilitator bagi seluruh pengembang dan pelaku (stakeholder) kepariwisataan Kota Batu. Landasan keberadaan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota Batu dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang kegiatan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pariwisata mempunyai tugas:

- a) Perumusan kebijakan teknis dan strategis pembangunan kepariwisataan
- b) Pembinaan objek dan daya tarik wisata serta pesona wisata budaya sebagai pemikat wisatawan
- c) Penyelenggaraan dan pembinaan pemasaran dan hubungan kepariwisataan dengan lembaga pasar wisata di dalam dan luar negeri
- d) Pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum;
- e) Penyelenggaraan dan pembinaan penyusunan program dan pengendalian pengembangan kepariwisataan

- f) Penyelenggaraan dan pembinaan sumberdaya manusia pariwisata, penggalangan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan
- g) Pengkoordinasian pengembangan, pengelolaan dan pemberdayaan produk pariwisata Kota Batu sebagai satu kesatuan daerah tujuan wisata
- h) Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan

Adapun uraian tugas kepala Dinas Pariwisata, Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan masing-masing kepala bidang sesuai surat keputusan Walikota diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pariwisata

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kepala Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. penyusunan dokumen anggaran;
- c. penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata dan kebudayaan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;

- f. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program;

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan dan perpustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. penyusunan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. penyusunan penetapan kinerja;
- e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan serta perpustakaan;

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi program

dan kegiatan pengembangan produk pariwisata. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis di bidang pengembangan produk pariwisata;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum;
- d. pelaksanaan bimbingan umum evaluasi dan pengawasan di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata dan objek serta daya tarik wisata;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum;
- f. penyiapan bahan rekomendasi perijinan usaha di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum;

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata
- b. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bidang Pengembangan Produk Pariwisata.

4. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengembangkan serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang;
- b. pelaksanaan kerjasama dalam promosi kebudayaan dan pariwisata;
- c. penyusunan rumusan kebijakan promosi kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan promosi dan pemasaran kebudayaan dan pariwisata serta penyediaan informasi pariwisata;
- e. pembinaan dan pengembangan promosi potensi kebudayaan dan pariwisata;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan bidang;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Informasi dan Analisa Pasar
- b. Seksi Promosi dan Kerjasama

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan sumber daya di bidang pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- b. pelaksanaan koordinasi pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- c. penyiapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- d. pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- e. pelaksanaan fasilitasi standarisasi kompetensi profesi di bidang pariwisata;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
- g. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan bidang;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata terdiri dari:

- a. Seksi Bimbingan dan Pelatihan
- b. Seksi Peran Serta Masyarakat

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

6. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menggali, melindungi, memelihara, memajukan, membina dan melakukan koordinasi serta mengembangkan bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

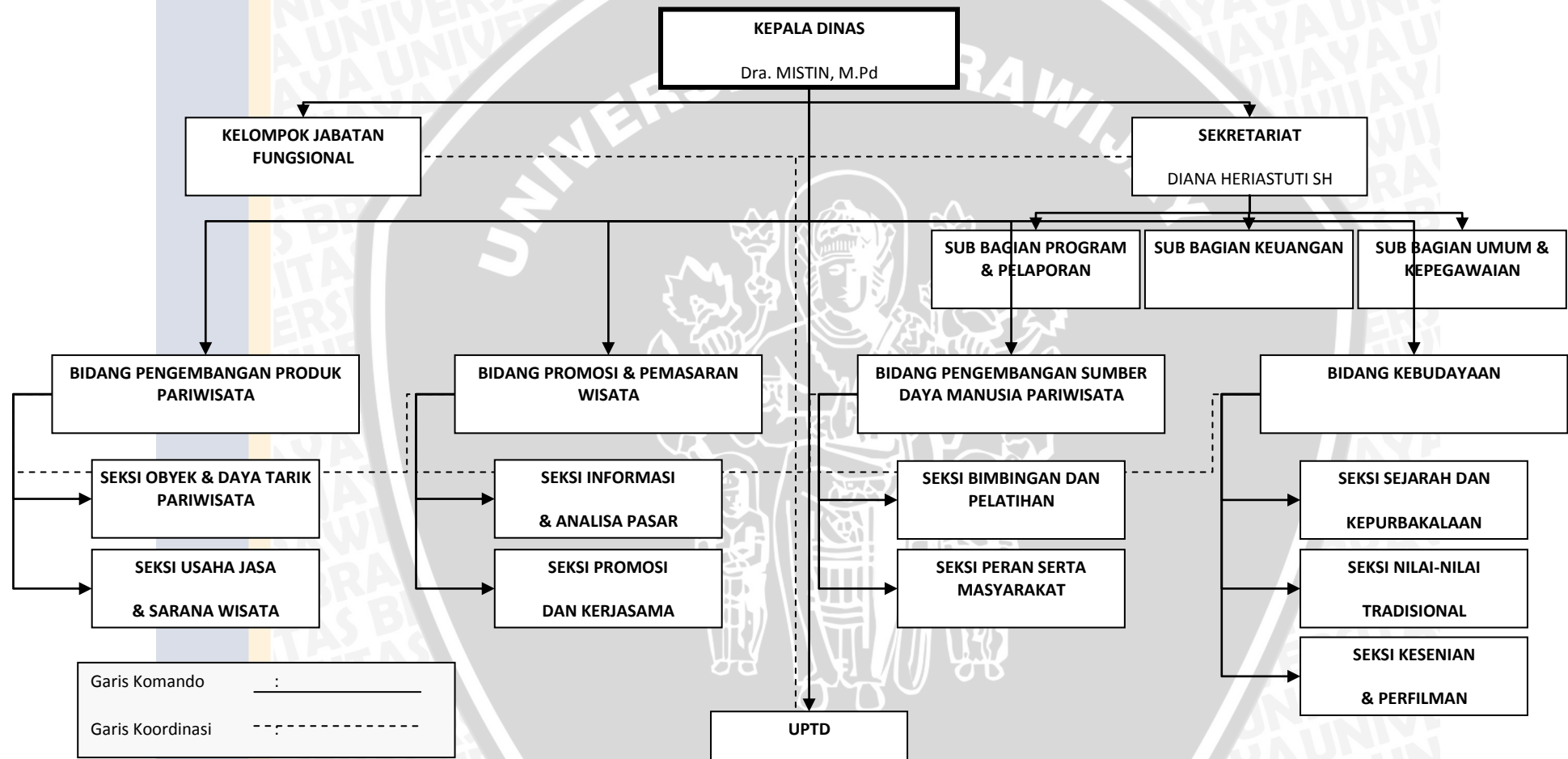
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala;
- c. pembinaan, penggalian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala;
- d. pelaksanaan kebijakan kerjasama bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala;
- e. pembinaan program pengembangan nilai-nilai sejarah, budaya, tradisional, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan bidang;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Kebudayaan terdiri dari:

- a) Seksi Sejarah dan Kependidikan
- b) Seksi Nilai-Nilai Tradisional
- c) Seksi Kesenian dan Perfilman



Tabel 3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu



3. Gambaran Umum Jawa Timur Park 1



Gambar 3. Logo Jawa Timur Park 1

a. Sekilas Tentang Jawa Timur Park 1

Jawa Timur merupakan daerah dengan potensi alam, flora, fauna, sejarah dan budaya yang beraneka ragam. Hal itu merupakan kekayaan besar bagi Jawa Timur sebagai satu dari beberapa provinsi yang ada di kawasan Indonesia. Sejalan dengan hal itu PT. Bunga Wangsa Sejati didukung oleh sekolah, perguruan tinggi, seniman, pengrajin dan pelaku bisnis di Provinsi Jawa Timur tergerak untuk mempromosikan Jawa Timur sebagai daerah tujuan wisata.

Jawa Timur Park 1 merupakan salah satu anak cabang dari perusahaan PT. Bunga Wangsa Sejati yang berbasis tempat rekreasi. Sesuai namanya, rekreasi ini berlokasi di Kota Batu Jawa Timur. Jawa Timur Park 1 atau biasa disebut Jatim Park 1 merupakan objek wisata yang memadukan konsep pendidikan dan wisata alam dalam satu ruang waktu.

Jawa Timur Park yang dibangun tahun 2001 ini berlokasi di lereng gunung Panderman (sekitar 2,5 km dari Kota Batu) merupakan sebuah objek wisata yang mampu memadukan secara serasi konsep pariwisata (*tourism*) dan konsep pendidikan (*education*). Sehingga dengan kombinasi tersebut Jawa Timur Park selain menjadi

tempat rekreasi juga berfungsi sebagai wahana penyebaran informasi tentang khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi serta keragaman budaya bangsa. Hal ini terkait dengan visi misi Jawa Timur Park yakni sebagai wahana belajar dan bermain. Selain itu Jawa Timur Park juga menjanjikan 3 wahana baru setiap tahunnya sebagai salah satu strategi pemasaran yang ditonjolkan dan demi kelangsungan perusahaan.

b. Peran PT. Bunga Wangsa Sejati Jawa Timur Park

Jawa Timur Park 1 dikelola oleh PT. Bunga Wangsa Sejati, yaitu sebuah perusahaan yang dimiliki oleh 3 pemegang saham yang salah satunya merupakan warga negara malaysia. Dengan luas area 7 hektar, pihak pengelola mengusahakan agar sajian wisatanya lengkap untuk memenuhi konsep “one stop service”. Konsep tersebut semacam konsep supermarket dimana pembeli dapat memenuhi kebutuhannya didalam satu tempat saja. Dengan konsep ini tentunya kualitas sajian yang baik serta layanan yang menyenangkan menjadi sangat penting sebagai pendukung.

PT. Bunga Wangsa Sejati Jawa Timur Park merupakan lembaga swasta yang bergerak di bidang kepariwisataan. Sebagai lembaga kepariwisataan Jawa Timur Park menyediakan wahana-wahana yang bersifat rekreatif bagi anak-anak maupun dewasa. Dengan motto Jawa Timur Park mengutamakan pelayanan, rasa aman, keasyikan dan pemeliharaan Jawa Timur Park selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada para konsumen atau pengguna jasa.

Jawa Timur Park sebagai salah satu wahana wisata di Indonesia juga merupakan lembaga swasta yang selalu berusaha untuk turut berperan aktif dalam

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu direalisasikan dengan pengadaan fasilitas-fasilitas pembelajaran dalam lingkup wisata. Oleh karena itu, selain bisa menikmati sarana-sarana rekreasi dan hiburan. Para pengguna jasa wisata Jawa Timur Park juga bisa mendapatkan informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta sejarah dan budaya bangsa.

Dari hasil wawancara dan observasi pada tanggal 17 Januari 2014 diperoleh data tentang peran penting Jawa Timur Park, yakni:

- a) Menciptakan dan membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk di sekitar area wisata.
- b) Menambah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah Kota Batu
- c) Membantu penataan pedagang kaki lima sehingga mengurangi keruwetan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu
- d) Mempromosikan dan memantapkan Kota Batu sebagai tujuan wisata yang representatif.
- e) Memperdulikan kelestarian lingkungan hidup atau ekologi alam dengan pemanfaatan sumber daya alam.

c. Visi dan Misi Jawa Timur Park

Visi Jawa Timur Park

Menjadikan Jawa Timur sebagai Kota Pariwisata dengan standar internasional yang mampu memberikan hiburan, kepuasan sekaligus wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pengunjung

Misi Jawa Timur Park

a. Mengelola dan mengembangkan tempat pariwisata yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran luar. Sehingga pelajar dan mahasiswa dapat “belajar” dan “berwisata” dalam satu tempat.

b. Memberikan pelayanan kepada pengunjung secara maksimal dengan cara selalu membuat inovasi terbaru terhadap fasilitas yang disediakan agar tidak monoton, sehingga pengunjung yang datang tidak merasa bosan.

c. Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian karyawan maupun masyarakat yang berada disekitar lokasi Jawa Timur Park 1. (Sumber : dok. Jawa Timur Park 1)

d. Struktur Organisasi

Manajemen Perusahaan Objek Wisata Jawa Timur Park 1 Kota Batu

Direksi:

Managing Director : Paul Sastro Sandjojo

Direktur Utama : Rio Imam Sendjojo, B. Com

Manager Accounting : Dra. Tenley Puspa

Manager Operasional : Bambang Priana

Manager HRD : Nur Asmeidaranie

Supervisor Engineering : Joko Setyanto

Supervisor F & B :Eri

Supervisor Marketing : Johanto Berbudi

Supervisor Art and Deco : Adimas Wahyu Timur

Supervisor HK, Pool and garden : Sutaji

Supervisor Entrance : Harmadi, SH

Supervisor Pembelajaran I, II : Hasim

Captain Entertainment : Bambang Susilo Adi

Chief Security : Nanang

Sumber : dok. Jawa Timur Park 1

e. Denah Lokasi Jawa Timur Park

Jawa Timur Park terletak di lereng timur gunung Panderman dengan luas area ± 11 Ha dan ketinggian 850m diatas permukaan laut. Lokasi Jawa Timur Park terletak di jalan Kartika No.02 Batu Jawa Timur. Lokasi ini dapat dijangkau ± 20 menit dari Kota Malang, 89 km dari bandara Juanda Surabaya serta dapat melintas melalui Kediri dan Jombang. Adapun batas lokasi wisata Jawa Timur Park yakni:

Tabel 4. Batas Wilayah Lokasi Wisata Jawa Timur Park

Arah	Lokasi Perbatasan
Barat	Klub Bunga Butik Resort, Agro Wisata
Utara	Kaki Gunung Panderman
Selatan	Hunian Warga, Pondok Jatim Park, Stadion Brantas
Timur	Hunian Waga, Pasar Batu

Adapun peta lokasi Jawa Timur Park adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Peta Lokasi Jawa Timur Park 1

f. Fasilitas Jawa Timur Park

Dengan suguhan ‘one stop service’ Jawa Timur Park menawarkan berbagai macam fasilitas kepada pengunjung yang berupa:

- Fasilitas Pembelajaran berupa Taman Belajar yang menyuguhkan beragam ilmu pengetahuan dan teknologi, peragaan sejarah dan kehidupan sosial, peragaan biologi dan tradisional knowledge, insectarium, baby zoo, taman burung, taman ikan, keseluruhan fasilitas pembelajaran ini menempati 30% dari keseluruhan area.
- Fasilitas rekreatif yang berhubungan dengan unsur permainan dan hiburan. Kawasan ini menempati 30% dari keseluruhan area.
- Fasilitas pendukung berupa, outlet-outlet makanan minuman, galerii seni dan souvenir. Kawasan ini menempati 20% dari keseluruhan area

- d. Fasilitas umum berupa, musholla, tempat parkir, klinik, open theatre dan toilet. Kawasan ini menempati 20% dari keseluruhan area.

Fasilitas pembelajaran dalam Taman Belajar Jawa Timur Park diadakan sebagai bentuk turut bertanggungjawabnya pihak swasta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara menyediakan diri sebagai “pusat sumber belajar” bagi siswa, mahasiswa maupun masyarakat umum. Adapun Taman Belajar Jawa Timur Park terdiri atas:

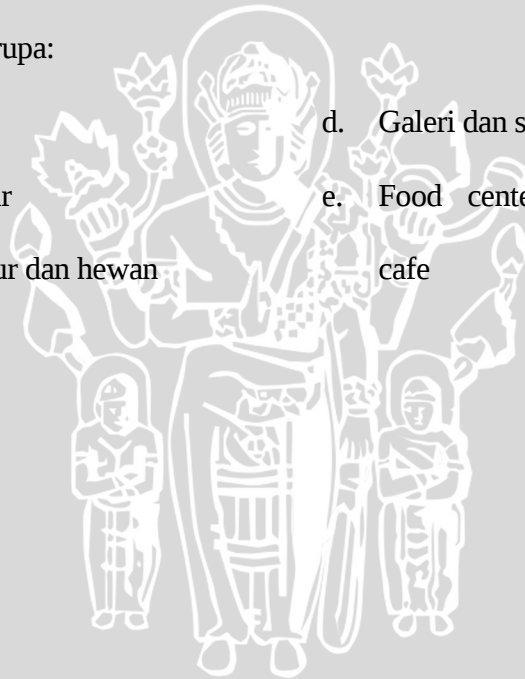
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| a. Taman Belajar (science centre) | d. Baby Zoo dan Diorama |
| b. Taman Sejarah (history park) | Perjuangan |
| c. Taman Agro | e. Fish Park |
| | f. Bird Park |

Fasilitas rekreasi dalam Taman Belajar dan Rekreasi Jawa Timur Park diadakan untuk membuat pengunjung menjadi lebih fresh dan fun,. Adapun fasilitas yang disajikan adalah:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| a. Flume Ride dan Speed Boat | g. Swimming pool |
| b. Photo Gallery | h. Adventure Zone and Games |
| c. Ghost Mansion (Rumah Hantu) | Room |
| d. Sirkuit Gokart | i. Mini jet |
| e. Play Ground | j. Jet coaster |
| f. Lost Garden (Taman Sesat) | k. Pipe House |

Selain itu Jawa Timur Park juga menyediakan fasilitas pendukung berupa outlet makanan dan minuman. Outlet-outlet ini merupakan upaya membangun potensi ekonomi kerakyatan dengan sepenuhnya memberikan tempat secara Cuma-Cuma untuk masa tertentu kepada pelaku bisnis dari berbagai pelosok disekitar lokasi dan daerah Jawa Timur. Dengan langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban pengangguran di daerah, membuka kesempatan usaha dan kesempatan kerja baru, membuat perputaran uang pada masyarakat lebih lama dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setidaknya bagi 135 pelaku bisnis dan 400 orang tenaga kerja mereka. Fasilitas ini berupa:

- a. Pasar wisata
- b. Stand jajan pasar
- c. Pasar buah, sayur dan hewan
- d. Galeri dan supermarket bunga
- e. Food center, restaurant dan cafe





Gambar 5. Peta Wisata Jawa Timur Park 1

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Bentuk Kemitraan Yang Terjalin Antara Jatim Park 1 Dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Dinas Pariwisata melalui evaluasi selalu mengadakan pengawasan terhadap pengembangan kepariwisataan di Kota Batu. Termasuk dalam proses kerjasama dengan pihak swasta yang disini salah satunya adalah PT. Bunga Wangsa Sejati. PT Bunga Wangsa Sejati mengelola Jawa Timur Park *Science Center* atau lebih dikenal dengan Jawa Timur Park yang turut berperan aktif dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi perekonomian rakyat dan meningkatkan bidang pariwisata di Jawa Timur. PT. Bunga Wangsa Sejati mengembangkan sebuah objek pariwisata yang memadkan konsep pendidikan dan pariwisata dalam satu ruang dan satu waktu agar masyarakat lebih mengenal budaya bangsa sekaligus memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendirikan Jawa Timur Park pada lahan seluas 22 ha dengan jarak sekitar 5 km dari Kota Batu. Dan juga Jawa Timur Park merupakan pelopor pariwisata yang berskala internasional.

Jawa Timur Park beminat dalam menginvestasikan modalnya di Kota Batu dikarenakan Kota Batu memiliki beberapa potensi yang menuntungkan pihak swasta untuk menanamkan modalnya. Diantaranya belum banyak objek pariwisata modern dan berskala internasional yang mengusung konsep *Fun and Study* maka dari itu Jawa Timur Park bisa dikatakan sebagai pelopor berdirinya pariwisata dengan beberapa konsep tersebut. Selain itu dikarenakan kondisi geografis Kota Batu yang berhawa sejuk dan dingin menjadi pertimbangan Jawa Timur Park untuk mendirikan objek pariwisata di Kota Batu tersebut.

Kemitraan pemerintah swasta merupakan program strategis yang penting dilakukan daerah sebab tidak mungkin seluruh permasalahan pembangunan masyarakat dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri. Terlebih lagi dalam pengembangan wisata tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keterbatasan pemerintah daerah tidak hanya dalam pengertian keterbatasan dana, tetapi juga keterbatasan jumlah tenaga, kemampuan/keahlian dan pengalaman serta manajerial. Dengan kerjasama pemerintah daerah dan swasta maka akan sangat membantu mempermudah dan meningkatkan potensi wisata daerah. melihat peluang tersebut maka pemerintah Kota Batu berinisiatif melakukan kerjasama dalam hal pengelolaan wisata dengan tujuan untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki. Karena pemerintah menyadari bahwa sektor swasta di Kota Batu mempunyai peluang yang cukup prospektif untuk dikembangkan menjadi industri pariwisata yang mampu bersaing dengan pariwisata di daerah lain bahkan mancanegara. Maka dari itu pemerintah Kota Batu menggandeng PT. Bunga Wangsa / Jawa Timur Park untuk melakukan kerjasama di bidang pariwisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Batu

Bentuk/model kerjasama merupakan suatu bentuk rancangan yang dirangkai sebelum melakukan kegiatan atau tindakan dalam rangka memprediksi seperti apa bentuk kegiatan yang akan terjadi. Dalam melakukan kerjasama, sebuah model menjadi suatu bentuk watak atau karakter yang dapat dijadikan sebagai identitas kedua belah pihak yang terlibat kemitraan. Model kemitraan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Batu dengan Jawa Timur Park secara umum berdasarkan pada model kemitraan mutualistik yang merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu untuk saling memberikan

manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal. Berdasarkan pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerja sama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya dan sekaligus saling menunjang satu dengan yang lain. Pemikiran kemitraan demikian itu diadopsi dari pola simbiosis mutualisme yang terjadi antara kerbau dan burung dalam kehidupan binatang (Sulistiyani, 2004:131) dalam hal ini Pihak Jatim Park dan Pemerintah Kota Batu Khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu sama-sama saling diuntungkan.

Karena mereka sama-sama saling membutuhkan. Dinas Kebudayaan Kota Batu merasa diuntungkan karena dengan adanya pihak swasta yang mau menanamkan modalnya di Kota Batu. Karena dengan adanya pihak swasta yang berinvestasi di Kota Batu maka akan menambah destinasi pariwisata di Kota Batu yang mana akan dapat menarik pengunjung untuk datang ke Kota Batu. Hal itu tentunya akan berkontribusi besar terhadap perekonomian Kota Batu. Diantaranya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meingkatkan perekonomian masyarakat lokal karena dengan adanya Jawa Timur Park masyarakat sekitar objek wisata merasa terbantuan. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu Ibu Mistin

“Memang dengan adanya Jawa Timur Park ini sangat membantu sekali perekonomian di Kota Batu. Jawa Timur Park tidak hanya menguntungkan bagi Pemerintah Kota Batu saja namun masyarakat pun juga turut terbantu. Masyarakat di sekitar objek wisata dapat menyewa ruko/tempat yang disediakan oleh pihak pengelola Jawa Timur Park untuk dapat membuka usaha dan mengembangkan usaha yang telah dimiliki oleh masyarakat sekitar objek wisata. Selain itu

masyarakat juga diuntungkan dengan adanya parkir pengunjung yang datang di Jawa Timur Park.” (Wawancara dengan Ibu Mistin, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Senin 10 Maret 2015 pukul 10.00 WIB)

Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Wafi selaku Kepala Kantor Holding Jawa Timur Park 1 (17 Maret 2015 pukul 09.30)

“Kami sangat beruntung dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Batu di Kota Batu ini. Kami dapat mengembangkan konsep Fun and Study yang telah menjadi project yang kami inginkan selama ini. Selain itu Kota Batu sangat cocok untuk dapat dikembangkan objek pariwisatanya baik dari kondisi geografis maupun secara administratif. Sebelum kami menanamkan investasi di Kota Batu tempat pariwisata di Kota Batu hanya berkonsep tradisional. Maka dari itu kami merinisiatif untuk memberikan sesuatu yang baru dengan menghadirkan objek pariwisata yang berskala internasional. Hal ini tentu saja juga akan meningkatkan pendapatan daerah Kota Batu sendiri. Begitu pula masyarakat Kota Batu pada umumnya”

Maka dari itu berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kedua belah pihak yang bekerja sama dapat saling menguntungkan. Jawa Timur Park 1 merupakan satu - satunya anak perusahaan dari Jawa Timur Group (JTPG) yang memiliki *brand positioning* yang jelas, yakni Taman Belajar dan Rekreasi. Bahkan, sebagai anak perusahaan tertua, Jawa Timur Park 1 mampu bersaing dengan competitor - kompetitornya, termasuk dengan *family brandnya*, seperti Jawa Timur Park 2 (JTP2), Eco Green Park (EGP), Batu Night Spectacular (BNS), dan Museum Angkut (MA). Bukti keeksistensian Jawa Timur Park 1 pada ranah nasional adalah menduduki peringkat dua sebagai tujuan wisata favorit pada Indonesia Tourism Award 2011. Sedangkan untuk kompetisi lokal, berdasarkan survei dari laman tripadvisor.com, Jawa Timur Park 1 mendapat posisi terfavorit kedua diantara *family brandnya*, Jawa Timur Park 2 dan Eco Green Park sebagai

tujuan wisata favorit di Kota Batu (www.jawatimurpark1.com diakses pada tanggal 8 Juli 2015)

Bentuk kemitraan yang terjalin antara Jawa Timur Park dengan Pemerintah Kota Batu yaitu dengan saling melakukan kegiatan promosi. Bentuk promosi yang dilakukan adalah dengan berbagai macam cara dan media diantaranya *advertising*, *direct marketing*, *personal selling*, *sales promotion*, *internet marketing*, dan *public relations*.

Advertising Jawa Timur Park 1



Gambar 6. Gambar Billboard event JTP1
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Jawa Timur Park 1 memiliki *advertising* yang bersifat modern seperti media cetak, audio, audio visual, hingga tradisional dengan toa. Menurut Titik S. Arianto, kepala Divisi Marketing Jawa Timur Park 1 tahun 2002-2013, pihak Jawa Timur Park 1 melakukan *advertising* pada media cetak seperti koran dengan sistem paketan dan kerjasama.

“Lokal, radar malang dan malang post. Jatim park pakai sistem voucher ya kalo bayar ngiklan di mereka. Jadi misal iklan ukuran 3x10 kolom seharga 7juta ditukar dengan voucher kamar atau sebesar 7jt tiket masuk.” (Titik, kepala Divisi Marketing JTP1 2002 - 2013).

Kepala Divisi Marketing JTP1 serng melakukan talkshow ke sejumlah radio di Kota Malang dan Pasuruan, seperti Tidar Sakti FM. Advertising audio visual yang dimiliki oleh JTP1 adalah iklan pada gerbong Kereta Api. Sedangkan untuk billboard dan spanduk, JTP1 lebih gencar melakukan jika sedang melakukan even, seperti promo beli tiket satu gratis dua bagi warga Kota Batu atau saat libur hari raya Idul Fitri 2013 lalu.

Sedangkan untuk media tradisional, Titik menyatakan bahwa Divisi Marketing Jawa Timur Park 1 sering menambah maintenance untuk ‘menjemput bola’ dengan berkeliling ke Desa - Desa di Kota Batu.

“Kota Batu itu banyak orang dengan garis kemiskinan kecil, mereka punya duit tapi edukasi rendah jadi mereka malas buat cari info, lebih baik kita yang turun ke jalan buat jemput bola, terutama di dekat kantor kelurahan, dimana masyarakatnya sering melewati kantor kelurahan. Biayanya juga nggak terlalu besar kalo pakai toa keliling di desa - desa dan spanduk di kelurahan dibandingkan sama pasang billboard di pusat kota atau di perbatasan. Harga untuk pasang+cetak spanduk di kota Cuma nyampai 5juta dengan ongkos spanduk 150ribuan. Cuma dengan nambah maintenance bisa dapat lebih” (Titik, kepala Divisi Marketing JTP1 tahun 2002 - 2013)

Advertising yang dimiliki oleh Jawa Timur Park 1 tidak hanya berfokus pada kemodernan media, namun pada target audiens. Jawa Timur Park 1 menggunakan media cetak, radio, dan iklan pada Kereta Api untuk meraih target audiens secara luas. Sedangkan penggunaan toa berkeliling untuk meraih target audiens secara khusus. Namun sayangnya, implementasi advertising Jawa Timur Park 1 dan masih dipengaruhi oleh *General Manager* (GM). Peran GM dalam menentukan lokasi baleho antar *family brand* menciptakan gap antar *family brand*.

Direct Marketing

Jawa Timur Park 1 menjadikan Direct Marketing sebagai komunikasi pemasaran utamanya, dimana Jawa Timur Park 1 dapat melakukan komunikasi dua arah dengan konsumen. Tidak jarang dengan database yang dilakukan Jawa Timur Park terhadap konsumen, mampu menarik konsumen lama untuk berkunjung, utamanya sekolah atau instansi yang berkunjung secara rombongan. Menurut Rajeev Batradan et.al dalam bukunya *The New Direct Marketing*, dialog yang dilakukan antara *marketer* dan konsumen tidak hanya memudahkan konsumen untuk mengakses informasi merchandise dan cara mendapatkannya saja. Namun mereka juga lebih mudah dalam mengakses informasi baru mengenai produk baru dan servis yang sesuai dengan minat. Jawa Timur Park 1 menggunakan brosur, mini card, telemarketing, dan broadcast message sebagai bagian dari direct marketingnya. Setiap harinya, konsumen menelpon Jawa Timur Park 1 untuk menanyakan berbagai informasi mulai dari harga tiket, jam operasional, hingga bantuan mencari penginapan. Sedangkan untuk brosur dan mini card, Jawa Timur Park 1 meletakkan pada kantor marketing dan event tertentu seperti pameran. Setiap tahunnya, Jawa Timur Park 1 selalu memperbarui desain dan informasi dalam brosurnya, terutama mengenai harga tiket dan wahana permainan terbaru.





Gambar 7. Brosur Jawa Timur Park Tahun 2014
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Internet Marketing

Jawa Timur Park 1, kini semakin gencar memanfaatkan media internet sebagai *tools* yang cukup menjanjikan. Jika sebelumnya ketika Titik masih menjabat sebagai kepala Divisi Marketing internet masih merupakan *tools* yang terabaikan, maka saat ini sudah berubah. Tahun 2008 hingga 2013, media internet yang dimiliki oleh Jawa Timur Park 1 antara lain: website, akun social media facebook dan twitter. Namun sayangnya, media tersebut jarang diupdate informasi mengenai program promosi Jawa Timur Park 1. Menurut Titik, jarangya informasi yang terupdate pada social media dan website Jawa Timur Park 1 dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang khusus menangani internet marketing. Namun pada akhir 2013, Jawa Timur Park 1 menambah SDM untuk menjadi *gate keeper internet marketing* Pada social media seperti facebook, twitter, instagram, bahkan website guna memberikan informasi pada konsumen.

Sales Promotion

Nilai tambahan atau isentif yang diciptakan oleh Jawa Timur Park 1 melalui *sales promotion*nya antara lain adalah pemberian bonus berupa gratis satu tiket bagi pembelian tiket rombongan kelipatan 30 orang. Jika jumlah rombongan 30 orang maka cukup membayar 29 tiket saja. Tidak hanya itu, *tour leader* atau *tour guide* akan mendapatkan gratis maksimal dua tiket setiap berkunjung. Rabat seperti ini, tentu akan menguntungkan untuk travel atau rombongan. Terlebih lagi, Jawa Timur Park 1 selalu melakukan database setiap rombongan yang melakukan transaksi. Bahkan terkadang, ketika sebuah travel sering melakukan transaksi rombongan, pihak Jawa Timur Park 1 tidak segan mengendorkan peraturan bonus tiket. Sayangnya, Jawa Timur Park 1 pada tahun 2013 melakukan program pemberian bonus dua tiket setiap pembelian satu tiket pada warga Kota Batu, yang dianggap sebagai sebuah program CSR. Padahal program tersebut jelaslah merupakan program sales promotion, dengan pemberian potongan harga atau rabat. *Sales promotion* merupakan kegiatan promosi yang cukup menarik bagi konsumen. Menurut Belch dalam bukunya *Advertising and Promotion: an Integrated marketing communication perspective*, *sales promotion* mampu memberikan nilai tambahan atau insentif kepada tenaga penjualan, distributor, atau konsumen akhir dan dapat merangsang langsung penjualan.

Personal Selling

Jawa Timur Park 1 melakukan personal selling ketika melakukan pameran bersama family brandnya. Jawa Timur Park 1 akan membawa brosur dan memberikan informasi pada pengunjung pameran mengenai Jawa Timur Park 1 dan family brand. Sayangnya, perwakilan Divisi Marketing Jawa Timur Park 1

dan family brandnya melakukan personal selling konservatif. Dimana mereka masih memaksa audiensnya untuk berkunjung ke masing-masing brand, daripada memberikan informasi mengenai kebutuhan kunjungan mereka.

Public Relations

Jawa Timur Park 1 tidak memiliki Divisi Public Relations (PR) tersendiri, namun masih mengandalkan perwakilan staff atau Kepala Divisi Marketing Jawa Timur Park 1 untuk melakukan komunikasi keluar dengan media. Jawa Timur Park 1 pada tahun 2002-2013 mengutus Kepala Divisi Marketingnya untuk menjadi perwakilan atau juru bicara, tidak hanya untuk Jawa Timur Park 1, namun juga untuk seluruh family brandnya. Jawa Timur Park 1 berfokus untuk menyampaikan berita baik, seperti peluncuran wahana permainan baru. Sedangkan untuk berita buruk seperti komplain, pihak Jawa Timur Park 1 maupun family brandnya tidak terlalu mengacuhkannya. Menurut Titik, Kepala Divisi Marketing JTP1 tahun 2013, kedekatan personalnya dengan media akan memudahkan berhubungan dengan media.

“semuanya kalo untuk urusan ketemu sama media itu sama saya. Mau yang jatim park 1 sampe jatim park 2 eco, semuanya saya pegang. Jadi bisa dibilang saya ini brand nya Jatim Park. Kalau ada apa - apa, pasti media yang nyari saya. Apalagi saya punya kedekatan personal dengan media.” (Titik, kepala Divisi Marketing JTP1 tahun 2002 - 2013).

Sedangkan pada tahun 2014, Kepala Divisi Marketing Jawa Timur Park 1 yang baru, Jojo menyatakan bahwa menjadi perwakilan/juru bicara dapat dilakukan oleh semua staff, bahkan untuk menjaga sel reputasi brand Jawa Timur Park 1, semua staff memiliki tanggung jawab yang sama.

Pernyataan kedua Kepala Divisi Marketing Jawa Timur Park 1 justru bertolak belakang satu sama lain. Ironisnya, persamaan kedua perwakilan tersebutlah yang menjadi kekurangan dalam implementasi Public Relations Jawa Timur Park 1 sebagai salah satu tools marcomm. Dimana Public Relations (PR) merupakan upaya membentuk hubungan baik. Bentuk komunikasi yang dilakukan bertujuan membentuk opini daripada menggerakkan audiens untuk menggunakan produknya saat itu juga (Belch, 2003).

2. Kontribusi Jawa Timur Park 1 Dalam Meningkatkan Perekonomian Kota Batu

a. Sebelum adanya Jawa Timur Park

Sebelum Jawa Timur Park dibangun (2002-2005) Kota Batu sudah dikenal dengan julukan Kota Pariwisata hanya saja daridulu dikenal dengan wisata alamnya. Karena pada saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu menyumbang 40% PAD Kabupaten Malang pada saat itu. Sebelum Jawa Timur Park menanamkan investasinya di Kota Batu sebagian besar masyarakat Kota Batu menggantungkan penghasilannya dari bercocok tanam dari hasil pertanian seperti hasil buah, sayur mayur dan juga dari peternakan sapi perah yang hasil susunya dapat dijual ke KUD Kota Batu setempat. Begitu pula Pemerintah Kota Batu mendapatkan pendapatan daerahnya dari banyaknya pengunjung yang datang ke beberapa objek wisata yang sudah ada di Kota Batu seperti pemandian air panas Cagar, taman bunga Selekt. Selain itu pendapatan daerah sebelum adanya Jawa Timur Park juga didapatkan dari pajak hotel dan rumah makan yang ada di kawasan Kota Batu.

Dan ketika sudah terlepas dari Kabupaten Malang, Kota Batu sendiri mengikrarkan bahwa dia adalah Kota Pariwisata. Perekonomian Kota Batu naik dari tahun ke tahun bahkan tertinggi di Jawa Timur. Pada saat itu sektor pariwisata alam dan pertanian menyumbang pendapatan terbesar dalam sektor ekonomi Kota

Batu. Lenih utamanya pertanian hortikultura yang menyumbangkan pendapatan tertinggi pada masa itu dan yang membuat petani mandiri dan sektor pariwisata hanya sebagai dampak ikutan saja. (sumber: wawancara dengan Kepala Bappeda Kota Batu (26 Mei 2013)

Tabel 5 Pendapatan Asli Daerah Kota Batu

NO	TAHUN	JUMLAH (Rp)
1.	1999	3.354.971.241
2.	2000	4.370.483.552
3.	2001	4.485.390.345
4.	2002	6.840.140.000
5.	2003	7.219.013.532
6.	2004	6.863.045.052

Sumber: <http://www.scribd.com/doc/21625792/Kontribusi-Sektor-Pariwisata-Terhadap-PAD-Kota-Batu-Malang#scribd>

b. Sesudah adanya Jawa Timur Park

Sejak dibangunnya Jawa Timur Park di Kota Batu membuat perekonomian Kota Batu perlahan-lahan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan konsep Jawa Timur Park yang menyuguhkan “one stop service” dimana objek pariwisata berskala internasional berkonsep Fun and Study ada dalam satu wilayah objek pariwisata Jawa Timur Park. Hal ini tentunya dapat menarik wisatawan untuk datang berwisata ke Kota Batu karena wisatawan berkesempatan untuk memilih objek wisata apa yang mereka senangi. Jika ingin berwisata pada objek wisata yang tidak hanya untuk bersenang-senang saja namun juga ada pembelajaran di objek wisata tersebut wisatawan dapat mengunjungi JawaTimurPark

Tabel 6. Jumlah Pengunjung Jawa Timur Park Tahun 2012

NO	NAMA DTW	BULAN																									TOTAL	
		JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER				
		W.NUS	W.MAN	W.NUS	W.MAN	W.NUS	W.MAN	W.NUS	W.MAN	W.NUS	W.MAN	W.NUS	W.MAN	W.NUS	W.MAN	W.NUS	W.MAN	W.NUS	W.MAN	W.NUS	W.MAN	W.NUS	W.MAN	W.NUS	W.MAN			
1	Pemandian Selecta	67.78 3	113	21.35 4	113	25.67 7	67	30003	139	44003	131	44575	132	35.823	154	60.199	121	38.236	115	32.818	145	40.902	91	86.515	90	529.299		
2	Kusuma Agro Wisata	4.982	56	4.750		1.135		1.025		1.287		1.786		1.552		1.478		1.010		925		1.113		2.315		23.414		
3	Jatim Park	9.267		10.18 0		4.946		8.292		17.559		14.814		4.603		19.002		8.036		10.531		11.195		19.995		138.420		
4	Air Panas Cangar	0		0		0		18.208		24.570		21.781		24.626		41.083		35.416		23.348		21.654		19.203		229.889		
5	Pemandian Songgoriti	4.000	20	2.600	10	210	6	3.220		3.400	20	6.010	10	2.011		1.200	1	3.600		3.900		4.552		5.030		39.800		
6	BNS (Batu Night Spectacular)	28.07 8		13.71 4		18.79 5		22.568		32.089		35.220		25.116		30.865		19.389		19.375		20.334		28.901		294.444		
7	Petik Apel "Makmur Abadi"	1.403		1.318	122	1.253	70	1352	65	2453	112	2105	31	1.780	29	712		1.763	25	2.349		1.966	59	2.870		21.837		
8	Vihara "Dammadhipa Arama"	253		241		250		290		301	3	752	32	1.202		339	7	751	14	633	12	1.043	123	975		7.221		
9	Museum Satwa	13.03 9		9.827		22.52 7		16.381		30.883		31.201		11.677		45.730		16.630		13.622		20.371		44.375		276.263		
10	Rafting " Kaliwatu "	764		526		796		771		1.299		928		473		697		491		430		705		807		8687		
11	Kampoeng Kidz	1571		885		1349		886		2571		5235		206		520		985		2.072		1.805		2.412		20497		
12	Banyu Brantas Rafting	104		26	2	20	3	85	4	45	10	86		48		20		99	17	217		103		95		984		
13	Hindu Dharma	786		528		1184		330		522		1673		769		669		705		877		802		811		9656		
14	Eco Green Park	Belum Buka																										
		132.030	189	65.94 9	247	78.142	146	103.41 1	208	160.982	276	166.166	205	109.886	183	202.51 4	129	127.11 1	171	111.09 7	157	126.54 5	273	214.304	90	1.600.411		
TOTAL KUNJUNGAN		132.219	66.196		78.288		103.619		161.258		166.371		110.069		202.643		127.282		111.254		126.818		214.394					

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kemitraan Jawa Timur Park dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu

a. Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor yang mendukung adanya kerjasama antara pemerintah Kota Batu dengan Jawa Timur Park sebagaimana yang diucapkan oleh Kepala Bagian Pengembangan Aries Imam Wahyono dalam wawancara sebagai berikut:

“kerjasama dalam pengelolaan wisata yang dilakukan dengan Jawa Timur Park sebagai investor jaa wisata akan banyak memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang juga mendukung program ini karena seperti yang sudah diketahui bahwa Jawa Timur Park merupakan investor dalam pengembangan pariwisata yang terkenal dan berhasil melakukan pengelolaan pariwisata seperti Bandung dan Bali. Selain itu dengan aksesibilitias yang mudah dan letak yang strategis memudahkan kami untuk melakukan pengelolaan wisata ini tentu saja dalam hal promosi. Selain itu koordinasi yang baik dari Jawa Timur Park mengakibatkan kerjasama ini berlangsung dengan baik” kota Batu kaya akan sumber daya alam yang merupakan modal utama dalam pengembangan pariwisata di Kota Batu. Berdasarkan pernyataan tersebut yang menjadi faktor pendukung dalam kemitraan sektor pariwisata di Kota Batu khususnya dengan Jawa Timur Park 1.

Sedangkan menurut pihak Jawa Timur Park sendiri ada beberapa faktor pendukung yang mengakibatkan kerjasama dalam pengelolaan wisata ini agar mampu berjalan dengan baik yaitu:

1. pengelolaan wisata yang dilakukan dengan pemerintah secara langsung tentu saja berpengaruh terhadap kemudahan dalam hal ijin mengembangkan daerah wisata
2. Dengan dukungan pemerintah maka semakin membantu Jawa Timr Park untuk mengembangkan kawasan wisata tanpa gangguan pihak lain
3. koordinasi antara pihak Jawa Timur Park sendiri juga mendukung adanya kerjasama dalam pengelolaan ini

4. pemerintah juga memberikan bantuan dalam hal sosialisasi terhadap masyarakat untuk mengurangi anggapan buruk masyarakat terhadap kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan wisata

Selain itu juga terdapat beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi kerjasama antara Jawa Timur Park dengan Pemerintah Kota Batu

1. Karakteristik dan Letak Wisata Jawa Timur Park 1

Dari tinjauan geografis Kota Batu memiliki wilayah yang menarik untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata karena kondisi geografis Kota Batu, dikelilingi pegunungan arjuno, Panderman, Welirang dan Kawi dengan ketinggian 680m sampai 1700m diatas permukaan laut. Suhu udara dalam kategori sejuk dan kering. Pada musim hujan suhu udara antara 15°C sampai 19°C dan pada musim panas mencapai suhu tertinggi 28°C. Kondisi ini menjadikan Kota Batu sangat potensial sebagai daerah tujuan wisata dan agrobisnis di Jawa Timur. Jawa Timur Park terletak di lereng timur gunung Panderman yang berdiri kokoh diantara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna menjadi background yang turut memperindah landscape landscape Kota Batu. Seperti yang diungkapkan oleh saudara Faisal Arif Nugraho pengunjung dari Malang bahwa:

“Wisata Jawa Timur Park sangat menarik sekali. Karena mengusung konsep Fun and Study dimana kita tidak hanya bersenang-senang namun juga kita dapat belajar sambil menikmati wahana wisata yang disuguhkan. Bagus sekali untuk mendidik anak-anak pada usia sekolah.” (wawancara pada 25 Juli 2015).

..... Wisata Jawa Timur memiliki berbagai macam wahana yang menantang dan menarik untuk dinikmati seperti Taman Sejarah (Science Center), Taman Sejarah (History Park), Taman Agro dan masih banyak lagi. Berdasarkan Data pada Tabel

Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata diatas jelas bahwa pada tahun 2013 pengunjung Jawa Timur Park mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan paling signifikan terjadi pada bulan Agustus dan Desember dimana pada dua bulan tersebut terjadi libur Hari Kemerdekaan Indonesia dan Hari Libur akhir tahun yang panjang. Untuk mempertahankan dan meningkatkan objek serta daya tarik wisata Jawa Timur Park agar pengunjung mengalami peningkatan terus menerus maka diharapkan dari pihak Jawa Timur Park untuk memberikan pelayanan yang bagus dan menambah wahana permainan yang bisa menarik pengunjung sebagaimana yang diungkapkan oleh Bambang Priana selaku Manager Operasional (wawancara pada tanggal 25 Juni 2015)

“untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Jawa Timur Park ini kami berkomitmen untuk mengadakan 3 (tiga) wahana baru setiap tahunnya namun seiring berjalannya waktu dan kondisi yang ada maka akan ada peningkatan dan penurunan pengunjung, selain adanya kompetitor-kompetitor baru yang ada didalam lingkungan PT.Bunga Wangsa sendiri seperti Jawa Timur Park 2, Eco Green Park, Museum Angkut dan Human Body Museum”

b. Kemudahan Izin yang diberikan

Faktor pendukung lain dalam kemitraan antara pemerintah Kota Batu dengan Jawa Timur Park yaitu mengenai kemudahan izin yang diberikan. Dalam menjalin kerjasama dengan Pemkot Batu Jawa Timur Park diberi kemudahan dan kelancaran dalam melakukan izin untuk berinvestasi dengan Pemkot Batu. Hal ini dikarenakan Jawa Timur Park sudah berinvestasi sejak dulu dan Pemerintah Kota Batu merasa sangat terbantu dengan terjalinnya kerjasama ini. Bappeda (Badan Pembangunan Daerah) Kota Batu yang mengatur ijin pembangunan daerah di Kota Batu tentunya memberi kemudahan dalam memberi izin Jawa Timur Park karena Jatim Park

memberikan peranan yang besar dalam peningkatan perekonomian Kota Batu. Pihak Bappeda sendiri berterima Kasih dengan adanya Jawa Timur Park karena sudah meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Batu dan juga dengan inovasi-inovasi yang telah diberikan kepada Kota Batu.

b. Faktor Penghambat

Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Kota Batu dengan Jawa Timur Park 1 tentu saja mengalami hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya

1. Batasan dalam pendirian bangunan

Faktor penghambat dalam kemitraan Pemerintah Kota Batu dengan Jawa Timur Park Kota Batu adalah dikarenakan adanya batasan dalam mendirikan bangunan. Menurut data yang didapat dari Bappeda Kota Batu terdapat beberapa batasan yang mengatur investor yang ingin berinvestasi di Kota Batu. Salah satunya merupakan batasan spasial yang diberikan kepada setiap investor yang masuk yaitu terdiri dari tata guna lahan dan pada jenis konstruksinya. Misalnya setiap investor tidak boleh membangun bangunan dengan ketinggian yang dapat merusak konstruksi dan ekosistem alam sekitar. Dan pada satu wilayah yang sama tidak boleh berdiri jenis usaha yang sama yang bergerak dibidang yang sama. Harus berbeda dengan usaha yang lainnya. Investor harus tetap dikendalikan baik dari sisi tata guna lahan dan tata guna bangunan

Fungsi dari Bappeda sendiri adalah untuk membatasi investor yang ingin berinvestasi produk dan jenis yang sama pada satu tempat. Karena di Kota Batu terdapat beberapa wilayah konservasi yang tidak bisa seorang investor pun untuk memilikinya. Seperti wilayah hutan, pemukiman penduduk, dan Ruang Tadah Hujan maka diperlukan

suatu pengendalian agar investor tidak terlalu luas dalam mengembangkan investasinya.

C. Pembahasan

1. Bentuk Kemitraan Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu Dengan Jawa Timur Park

Melalui kebijakan otonomi daerah yang telah berlaku di berbagai daerah menyebabkan setiap daerah harus mampu meningkatkan kemandirian daerah melalui potensi yang dimiliki seperti yang diungkapkan oleh Sedarmayanti (2004:34) yang menjelaskan mengenai kewenangan otonomi daerah yang luas yaitu keluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan seluruh bidang. Kewenangan tersebut dimiliki oleh daerah kabupaten/koas secara utuh dan bulat mulai dari aspek perencanaan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasinya.

Dengan adanya keberhasilan kemitraan yang terjalin antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu dengan Jawa Timur Park Kota Batu menunjukkan kinerja yang baik. Bentuk kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kota Batu dengan Jawa Timur Park 1 adalah dengan sama-sama menyadari betapa pentingnya menjalin kerja sama karena saling membutuhkan. Saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal.

Jawa Timur Park berinvestasi di Kota Batu dikarenakan beberapa alasan yaitu karena Kota Batu memiliki pemandangan yang indah, berhawa sejuk dan kering. Jawa Timur Park beminat dalam menginvestasikan modalnya di Kota Batu dikarenakan Kota Batu memiliki beberapa potensi yang menuntungkan pihak swasta untuk menanamkan

modalnya. Diantaranya belum banyak objek pariwisata modern dan berskala internasional yang mengusung konsep *Fun and Study* maka dari itu Jawa Timur Park bisa dikatakan sebagai pelopor berdirinya pariwisata dengan beberapa konsep tersebut. Selain itu dikarenakan kondisi geografis Kota Batu yang berhawa sejuk dan dingin menjadi pertimbangan Jawa Timur Park untuk mendirikan objek pariwisata di Kota Batu tersebut.

Kemitraan pemerintah swasta merupakan program strategis yang penting dilakukan daerah sebab tidak mungkin seluruh permasalahan pembangunan masyarakat dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri. Terlebih lagi dalam pengembangan wisata tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keterbatasan pemerintah daerah tidak hanya dalam pengertian keterbatasan dana, tetapi juga keterbatasan jumlah tenaga, kemampuan/keahlian dan pengalaman serta manajerial. Dengan kerjasama pemerintah daerah dan swasta maka akan sangat membantu mempermudah dan meningkatkan potensi wisata daerah. melihat peluang tersebut maka pemerintah Kota Batu berinisiatif melakukan kerjasama dalam hal pengelolaan wisata dengan tujuan untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki. Karena pemerintah menyadari bahwa sektor swasta di Kota Batu mempunyai peluang yang cukup prospektif untuk dikembangkan menjadi industri pariwisata yang mampu bersaing dengan pariwisata di daerah lain bahkan mancanegara. Maka dari itu pemerintah Kota Batu menggandeng PT. Bunga Wangsa / Jawa Timur Park untuk melakukan kerjasama di bidang pariwisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Batu

Bentuk/model kerjasama merupakan suatu bentuk rancangan yang dirangkai sebelum melakukan kegiatan atau tindakan dalam rangka memprediksi seperti apa bentuk kegiatan yang akan terjadi. Dalam melakukan kerjasama, sebuah model menjadi suatu bentuk

watak atau karakter yang dapat dijadikan sebagai identitas kedua belah pihak yang terlibat kemitraan.

Model kemitraan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Batu dengan Jawa Timur Park secara umum berdasarkan pada model kemitraan mutualistik yang merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal. Berdasarkan pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerja sama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya dan sekaligus saling menunjang satu dengan yang lain. Pemikiran kemitraan demikian itu diadopsi dari pola simbiosis mutualisme yang terjadi antara kerbau dan burung dalam kehidupan binatang (Sulistiyani, 2004:131) dalam hal ini Pihak Jatim Park dan Pemerintah Kota Batu Khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu sama-sama saling diuntungkan.

Selain itu apabila dikaji menurut azas organisasi, menurut Sulistiyani (2004:131) model kemitraan seperti ini juga digolongkan dalam linear union of partnership yang merupakan penggabungan pihak-pihak untuk melakukan kerja sama karena memiliki kesamaan secara relatif berupa tujuan, misi, organisasi maupun legalitas. Dalam sistem kerjasama antara pemerintah Kota Batu dengan Jawa Timur Park memiliki kekuatan organisasi yang berbeda namun keduanya menggabungkan diri untuk bekerjasama dalam tujuan dan visi yang sama. Karena bersifat linear maka hubungan organisasi keduanya berada pada satu garis lurus dimana tidak ada satu pihak yang

tersubordinatif. Namun jelas bahwa keduanya memiliki peran tersendiri dalam pengelolaan wisata Jawa Timur Park. Pemerintah Kota Batu dan Jawa Timur Park merupakan pihak-pihak yang saling membutuhkan satu sama lain walaupun memiliki kewenangan yang berbeda.

2. Kontribusi Jawa Timur Park 1 Dalam Meningkatkan Perekonomian Kota Batu

a. Kontribusi sebelum adanya Jawa Timur Park

Sebelum Jawa Timur Park dibangun Kota Batu sudah dikenal dengan julukan Kota Pariwisata hanya saja daridulu dikenal dengan wisata alamnya. Karena pada saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu menyumbang 40% PAD Kabupaten Malang pada saat itu. Sebelum Jawa Timur Park menanamkan investasinya di Kota Batu sebagian besar masyarakat Kota Batu menggantungkan penghasilannya dari bercocok tanam dari hasil pertanian seperti hasil buah, sayur mayur dan juga dari peternakan sapi perah yang hasil susunya dapat dijual ke KUD Kota Batu setempat. Begitu pula Pemerintah Kota Batu mendapatkan pendapatan daerahnya dari banyaknya pengunjung yang datang ke beberapa objek wisata yang sudah ada di Kota Batu seperti pemandian air panas Cagar, taman bunga Seleka. Selain itu pendapatan daerah sebelum adanya Jawa Timur Park juga didapatkan dari pajak hotel dan rumah makan yang ada di kawasan Kota Batu.

Dan ketika sudah terlepas dari Kabupaten Malang, Kota Batu sendiri mengikrarkan bahwa dia adalah Kota Pariwisata. Perekonomian Kota Batu naik dari tahun ke tahun bahkan tertinggi di Jawa Timur. Pada saat itu sektor pariwisata alam

dan pertanian menyumbang pendapatan terbesar dalam sektor ekonomi Kota Batu. Lenih utamanya pertanian hortikultura yang menyumbangkan pendapatan tertinggi pada masa itu dan yang membuat petani mandiri dan sektor pariwisata hanya sebagai dampak ikutan saja. (sumber: wawancara dengan Kepala Bappeda Kota Batu (26 Mei 2013))

b. Kontribusi sesudah adanya Jawa Timur Park

Sejak dibangunnya Jawa Timur Park di Kota Batu membuat perekonomian Kota Batu perlahan-lahan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan konsep Jawa Timur Park yang menyuguhkan “one stop service” dimana objek pariwisata berskala internasional berkonsep Fun and Study ada dalam satu wilayah objek pariwisata Jawa Timur Park. Hal ini tentunya dapat menarik wisatawan untuk datang berwisata ke Kota Batu karena wisatawan berkesempatan untuk memilih objek wisata apa yang mereka senangi. Jika ingin berwisata pada objek wisata yang tidak hanya untuk bersenang-senang saja namun juga ada pembelajaran di objek wisata tersebut wisatawan dapat mengunjungi Jawa Timur Park.

Selain itu setelah dibangunnya Jawa Timur Park berdampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Pihak Jawa Timur Park juga melakukan kerja sama dengan masyarakat sekitar seperti menyediakan lahan parkir yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan sistem bagi hasil. Tidak lupa Jawa Timur Park juga menyediakan stand usaha baik yang berada diluar kawasan wisata maupun yang berada di dalam kawasan wisata Jawa Timur Park. Stand usaha tersebut disediakan oleh pihak pengelola dengan sistem sewa. Jadi siapapun masyarakat yang juga ingin ikut berinvestasi dapat langsung bergabung dengan pihak Jawa Timur Park tanpa harus

mengalami kesulitan. Selain itu pihak Jawa Timur park bekerja sama dengan masyarakat dengan merekrut warga asli Batu untuk dapat bekerja menjadi staff atau karyawan di dalam Jawa Timr park. Hal itu tentu saja harus didukung dengan SDM yang baik dan memiliki soft skill maupun hard skill untuk dapat diterima menjadi bagian dari Jawa Timur Park sendiri.

Kota Batu sangat berterima kasih dengan dibangunnya Jawa Timur Park ini dikarenakan Jawa Timur Park banyak memberikan kontribusi yang baik terhadap Pmerintah Kota Batu dan masyarakat Kota Batu pada umumnya selain itu Jawa Timur Park juga memberikan banyak inovasi bagi kemajuan di bidang pariwisata Kota Batu.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat Menurut Arsyad (2004:312-313) peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses meningkatkan pembangunan ekonomi daerah antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Entrepreneur*

Dengan adanya peran pemerintah daerah sebagai *entrepreneur*, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat mengembangkan suatu usaha sendiri melalui BUMD. Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomi menguntungkan.

2. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan didaerahnya. Perluasan dari peranan ini dalam pembanngunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam proses pengumpulan dan

pengevaluasian informasi ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran dan lainnya.

Dalam peranannya sebagai koordinator, pemerintah daerah juga dapat melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan startegi-strategi. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah dengan nasional dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapat manfaat yang maksimum daripadanya.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (*zoning*) yang lebih baik.

4. Simulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan, pembuatan outlets, mengadakan pameran dan lain-lain.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kemitraan Jawa Timur Park dengan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu

a. Faktor Pendukung

Dari hasil wawancara dengan pemerintah maupun pihak Jawa Timur Park diketahui bahwa dalam kerjasama yang terjadi selama 10 tahun berjalan terhadap koordinasi yang baik antara kedua belah pihak sehingga kemitraan dalam pengelolaan, promosi dan pengembangan kawasan wisata dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak memegang prinsip-prinsip dalam kemitraan dimana seperti yang diungkapkan oleh Hatiefah bahwa untuk menjalin kerjasama yang baik maka diperlukan tiga prinsip dalam kemitraan yaitu kepercayaan, kesetaraan dan kemandirian. Pemerintah Kota Batu menaruh kepercayaan penuh kepada Jawa Timur Park untuk mengelola dan mengembangkan kawasan wisata Jawa Timur Park yang mendapat dukungan berupa jaminan dari pemerintah. Koordinasi yang baik dilakukan karena dalam kerjasama ini tidak ada pihak yang dianggap superior, kedua pihak memiliki kedudukan yang setara karena masing-masing telah memiliki hak dan kewajiban.

Kerjasama antara pemerintah Kota Batu dengan Jawa Timur Park bila dilihat dari model kemitraan yang dijelaskan oleh Sulistiyan (2004:130) adalah menggunakan model kemitraan mutualistik dimana kedua belah pihak sama-sama menguntungkan. Dapat dilihat bahwa faktor pendukung dalam kemitraan ini adalah pemahaman kedua pihak baik pemerintah Kota Batu maupun Jawa Timur Park melakukan kemitraan, manfaat yang mereka peroleh dengan melakukan kemitraan sehingga dapat mewujudkan visi masing-masing.

b. Faktor Penghambat

Selama kurun waktu 10 tahun hingga sekarang kerjasama Pemerintah Kota Batu dengan Jawa Timur Park telah mengalami kemajuan baik sehingga mampu menarik minat wisatawan untuk mengunjungi Kota Batu. Namun masih ada beberapa kendala yang mengakibatkan pengelolaan wisata Jawa Timur Park agak tersendat-sendat.

Faktor penghambat dalam kemitraan Pemerintah Kota Batu dengan Jawa Timur Park Kota Batu adalah dikarenakan adanya batasan dalam mendirikan bangunan. Menurut data yang didapat dari Bappeda Kota Batu terdapat beberapa batasan yang mengatur investor yang ingin berinvestasi di Kota Batu. Salah satunya merupakan batasan spasial yang diberikan kepada setiap investor yang masuk yaitu terdiri dari tata guna lahan dan pada jenis konstruksinya.

Hal ini sesuai dengan peran serta masyarakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata Pasal 30 yaitu:

1. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
2. Dalam rangka proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan.
3. Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Misalnya setiap investor tidak boleh membangun bangunan dengan ketinggian yang dapat merusak konstruksi dan ekosistem alam sekitar. Dan pada satu wilayah yang sama tidak boleh berdiri jenis usaha yang sama yang bergerak di bidang yang sama.

Harus berbeda dengan usaha yang lainnya. Investor harus tetap dikendalikan baik dari sisi tata guna lahan dan tata guna bangunan

Fungsi dari Bappeda sendiri adalah untuk membatasi investor yang ingin berinvestasi produk dan jenis yang sama pada satu tempat. Karena di Kota Batu terdapat beberapa wilayah konservasi yang tidakbisa seorang investor pun untuk memilikinya. Seperti wilayah hutan, pemukiman penduduk, dan Ruang Tadah Hujan maka diperlukan suatu pengendalian agar investor tidak terlalu luas dalam mengembangkan investasinya.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat Menurut Arsyad (2004:312-313) peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses meningkatkan pembangunan ekonomi daerah antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Entrepreneur*

Dengan adanya peran pemerintah daerah sebagai *entrepreneur*, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat mengembangkan suatu usaha sendiri melalui BUMD. Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomi menguntungkan.

2. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan didaerahnya. Perluasan dari peranan ini dalam pembanngunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran dan lainnya.

Dalam peranannya sebagai koordinator, pemerintah daerah juga dapat melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan startegi-strategi. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah dengan nasional dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapat manfaat yang maksimum daripadanya.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (*zoning*) yang lebih baik.

4. Simulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada didaerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan, pembuatan outlets, mengadakan pameran dan lain-lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebagai bentuk usaha pengembangan sektor kepariwisataan daerah pemerintah Kota Batu melakukan terobosan baru dengan Jawa Timr Park melalui sistim kerjasama antara dua belah pihak yaitu antara pemerintah dengan dan swasta dalam hal ini PT. Bunga Wangsa Sejati atau lebih dikenal dengan Jawa Timur Park sebagai mitra kerja dalam mengelola kawasan wisata di Kota Batu
2. Kemitraan antara pemeribtah Kota Batu dengan Jawa Timur Park ini diawali dengan dimana pemerintah daerah membuka kesempatan bagi siapapun investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Batu untuk berinvestasi dalam mengembangkan kawasan pariwisata di Kota Batu. PT. Bunga Wangsa Sejati dikenal sebagai perusahaan pengelolaan di bidang pariwisata yang sudah dikenal luas dengan harapan mampu mengembangkan kepariwisataan daerah.
3. Dalam implementasinya kerjasama pemerintah Kota Batu dengan Jawa Timr Park sudah menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah di bidang pariwisata dan juga terbantunya perekonomian masyarakat Kota Batu dengan adanya Jawa Timur Park ini.

B. Saran

Dari penjelasan mengenai kerjasama pemerintah Kota Batu dengan Jawa Timur Park dalam meningkatkan perekonomian Kota Batu diatas ada beberapa saran yang diajukan peneliti yaitu diantaranya dalam membuka peluang berinvestasi kepada seluruh sektor swasta yang ingin menanamkan modalnya di Kota Batu ada baiknya agar pemerintah Kota Batu lebih meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Batu yaitu antara lain dengan Pelayanan Investasi satu pintu, mengefektifkan promosi, pelayanan dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal, Studi banding pelayanan investasi, menggali peluang dan menetapkan keunggulan daerah dan kesediaan meninjau ulang peraturan daerah yang bermasalah serta membangun sarana, prasarana dan sumberdaya manusia. Selain itu pemerintah Kota Batu diharapkan untuk mampu mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan dihadapi jika ada investor yang kelak akan menanamkan modalnya

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khoirul, dkk. 2003. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah (SIMDA)*. Jogjakarta: Pustaka Belajar.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPSTIE. YKPN.
- Basuki, Ananto dan Shofwan. 2006. *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*. Malang: SPOD
- Christie Mill, Robert. 2000. *Tourism The International Bussiness*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hafsah, Mohammad Jafar, Dr, Ir. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Harun. 2004. *Buku Panduan Sapta Pesona*. Denpasar: Dinas Pariwisata Propinsi Bali.
- Hasan, Iqbal M. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Melayu. S.P. 1987. *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesian*. Bandung: CV. Armico.
- Indradi, Sjamsiar, Sjamsuddin. 2008. *Administrasi Pemerintahan Lokal*. Malang: Agritek YPN Malang.
- Keban, Yeremias. T, 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Kinerja, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Kencana, Inu, Drs, M.Si. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Pitana, I Gede Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.

Sedarmayanti, Prof. Dr. 2003. *Good Governance Dalam Otonomi Daerah*. Bandung: Bandar Maju.

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan. Menuju Produktivitas Menuju Good Governance Bagian Kedua*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

_____. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sinambela, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Spillane, J.J. 1987. *Ekonomi Pariwisata. Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.

_____. 1994. *Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV. Alfabeta.

_____. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyan, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pembedayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Gava Media.

Sumarto, Hertiefah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suryanto, Bagong. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: UM. Press.

Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: PT. Pertja.

Yoeti, Oka. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

_____. 2001. *Ilmu Pariwisata: Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya*. Jakarta: PT. Pertja.

_____. 2006. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: PT. Angkasa.

_____. 2008. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Peraturan dan Perundangan

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Perusahaan Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengolahan Infrastruktur

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Inpres Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

